



LAPORAN KINERJA 2019

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN,
DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



KATA PENGANTAR




Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya serta dukungan seluruh rekan kerja, sehingga buku Laporan Kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Pusdiklat JPPPIW) telah selesai disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan seluruh program dan kegiatan tahun anggaran 2019. Laporan Kinerja ini merupakan wujud implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP.

Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai peran yang sangat penting dalam pencapaian target pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan melalui serangkaian tahapan kegiatan, dimulai dari tahap penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan, sampai dengan pengawasan pembangunan. Melihat pentingnya peran ASN tersebut, Pusdiklat JPPPIW sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai tanggung jawab besar dalam mewujudkan ASN yang kompeten dalam penyelenggaraan infrastruktur yang handal di bidang jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.

Pusdiklat JPPPIW selalu berupaya menciptakan ASN yang mumpuni, inovatif, berpegung teguh pada prinsip-prinsip integritas, kerjasama dan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan untuk pembangunan infrastruktur bidang jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah yang handal, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Laporan Kinerja Pusdiklat JPPPIW tahun 2019 menggambarkan kinerja yang telah dicapai selama tahun 2019 dalam meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bidang jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah. Tidak dapat dipungkiri dalam pencapaiannya



masih terdapat kendala dan permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu masukan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dalam meningkatkan kinerja Pusdiklat JPPPIW pada masa yang akan datang.

Bandung, Januari 2020
Kepala Pusdiklat JPPPIW

Ir. Thomas Setiabudi Aden, M.Sc.Eng.
NIP. 196405201989031020




RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan berdasarkan pada Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, maka diturunkanlah Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang merupakan tahapan ketiga dari RPJPN tahun 2005-2025. Atas dasar itulah, dengan disertai Agenda Prioritas Nasional Presiden RI ke 7, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 yang menjadi landasan disusunnya Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) 2015-2019. Substansi Renstra Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Pusdiklat JPPPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersumber pada Renstra BPSDM yang menjadi panduan Pusdiklat JPPPIW dalam melaksanakan rencana kerja tahunan serta dalam pembuatan laporan kinerja tahunan.

Berbagai pelaksanaan kegiatan hingga *output* yang diperoleh dari pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia Kementerian PUPR bidang jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah menjadi komponen penting dalam mendukung pencapaian *outcome* Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yaitu meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan persyaratan jabatan.

Sebagaimana dinyatakan dalam Renstra BPSDM tahun 2015-2019, rumusan tujuan BPSDM adalah meningkatkan kompetensi dan integritas SDM PUPR. Sejalan dengan hal tersebut, maka tujuan Pusdiklat JPPPIW adalah:


1. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana pendidikan dan pelatihan bidang jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah;
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah;

- 
3. Menyusun dan mengembangkan kurikulum dan materi pelatihan bidang jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah;
 4. Membina dan mengembangkan Widyaiswara dan tenaga pengajar, instruktur serta fasilitator pelatihan; dan
 5. Memantau, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.

Sasaran strategis Pusdiklat JPPPIW sejalan dengan sasaran strategis BPSDM. Adapun sasaran strategis Pusdiklat JPPPIW yang akan dicapai dari tujuan tersebut, yaitu tersedianya SDM yang kompeten dalam pembangunan infrastruktur yang handal dengan indikator sasaran strategis berupa persentase SDM PUPR yang kompetensinya sesuai dengan persyaratan jabatan. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra yang akan dilaksanakan oleh Pusdiklat JPPPIW melalui berbagai kegiatan dalam TA 2019.

Tugas Pusdiklat JPPPIW adalah melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan, jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah. Adapun indikator *output* pada tahun 2019 yang tertera pada dokumen Perjanjian Kinerja yang telah terealisasi sebagai berikut:

1. ASN yang Terlatih dengan rencana awal sebanyak 2.940 orang direvisi menjadi 2.970 orang, terealisasi sebanyak 3.045 orang atau sebesar 103%;
2. Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Pelatihan dengan rencana awal sebanyak 27 dokumen direvisi menjadi 26 dokumen, terealisasi sebanyak 22 dokumen atau sebesar 73%;
3. ASN yang Terdidik dengan rencana sebanyak 105 orang, terealisasi sebanyak 104 orang (yang dibiayai di tahun 2019) atau sebesar 99%;
4. Layanan Sarana dan Prasarana Internal dengan rencana sebanyak 1 layanan, terealisasi sebanyak 1 layanan atau sebesar 100%;


- 
5. Layanan Dukungan Manajemen Satker dengan rencana sebanyak 1 layanan, terealisasi sebanyak 1 layanan atau sebesar 100%; dan
 6. Layanan Perkantoran dengan rencana sebanyak 1 layanan, terealisasi sebanyak 1 layanan atau sebesar 100%.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Pusdiklat JPPPIW meliputi 2 (dua) unit Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan (BUCSD), yaitu Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Jalan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BUCSD JJPIW) yang berada di kota Bandung dan Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Perumahan dan Permukiman (BUCSD PERKIM) yang berada di kota Semarang. Namun pada tahun 2019 ini tepatnya pada bulan Oktober BUCSD PERKIM berubah nomenklatur menjadi Politeknik Pekerjaan Umum (Politeknik PU). Perubahan nomenklatur ini menjadikan BUCSD PERKIM (yang saat ini menjadi Politeknik PU) tidak lagi berada di bawah naungan Pusdiklat JPPPIW, dikarenakan tugas dan fungsinya pun telah berubah.

Namun demikian tugas dan fungsi BUCSD PERKIM tidak serta merta hilang, tugas dan fungsi BUCSD PERKIM melekat pada BUCSD JJPIW. Melekatnya tugas dan fungsi tersebut mengakibatkan perubahan nomenklatur pada BUCSD JJPIW menjadi Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BUCSD JPPPIW). Pada saat BUCSD PERKIM melakukan revisi Perjanjian Kinerja karena pergantian nomenklatur tersebut, BUCSD PERKIM masih mencantumkan target Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Pelatihan sebanyak 7 dokumen, akan tetapi sampai dengan tahun anggaran berakhir Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Pelatihan tidak terealisasi karena BUCSD PERKIM sedang melakukan persiapan pembentukan Politeknik PU.

Adapun indikator *output* BUCSD JPPPIW pada tahun 2019 yang telah terealisasi sebagai berikut:

1. Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Pelatihan dengan rencana sebanyak 8 dokumen, terealisasi sebanyak 8 dokumen atau sebesar 100%;
2. Layanan Sarana dan Prasarana Internal dengan rencana sebanyak 1 Layanan, terealisasi sebanyak 1 Layanan atau sebesar 100%;

- 
3. Layanan Dukungan Manajemen Satker dengan rencana sebanyak 1 Layanan, terealisasi sebanyak 1 Layanan atau sebesar 100%; dan
 4. Layanan Perkantoran dengan rencana sebanyak 1 Layanan, terealisasi sebanyak 1 Layanan atau sebesar 100%.


Kinerja Pusdiklat JPPPIW pada tahun 2019 termasuk dalam kategori predikat memuaskan, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 35.977.132.000,- dari pagu Rp 37.644.824.000,- dengan persentase realisasi keuangan 95,57% dan realisasi fisik sebesar 97,54%. Sedangkan BUCSD JPPPIW dengan pagu Rp 13.483.684.000,- terealisasi sebesar Rp 13.034.275.000,- dengan persentase realisasi keuangan 96,67% serta realisasi fisik sebesar 100,00% (Data *E-monitoring* Kementerian PUPR, 31 Desember 2019).

Sebagai perbandingan, berikut realisasi Pusdiklat JPPPIW pada tahun 2018, yaitu:

1. Dukungan Manajemen/Layanan Internal dengan rencana sebanyak 18 Laporan, terealisasi sebanyak 18 Laporan atau sebesar 100 %;
2. Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Pelatihan dengan rencana sebanyak 13 dokumen, terealisasi sebanyak 16 dokumen atau sebesar 123%;
3. ASN Yang Terdidik dengan rencana sebanyak 297 orang, terealisasi sebanyak 220 orang atau sebesar 74%;
4. Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana dengan rencana sebanyak 500 m², terealisasi sebanyak 500 m² atau sebesar 100%; dan
5. Peralatan dan Perlengkapan dengan rencana sebanyak 72 unit, terealisasi sebanyak 72 unit atau sebesar 100%.

Adapun indikator *output* BUCSD JPPPIW, yaitu gabungan dari BUCSD JJPIW dan BUCSD PERKIM pada tahun 2018 yang terealisasi sebagai berikut:

1. Dukungan Manajemen/Layanan Internal dengan rencana sebanyak 14 Laporan (8 laporan BUCSD JJPIW dan 6 laporan BUCSD PERKIM), terealisasi sebanyak 14 Laporan atau sebesar 100 %;

- 
2. Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Pelatihan dengan rencana sebanyak 30 dokumen (16 dokumen BUCSD JJPIW dan 14 dokumen BUCSD PERKIM), terealisasi sebanyak 30 dokumen atau sebesar 100%; dan
 3. Perlengkapan dan Peralatan dengan rencana sebanyak 385 unit (133 unit BUCSD JJPIW dan 252 unit BUCSD PERKIM), terealisasi sebanyak 385 unit, atau sebesar 100%.

Capaian kinerja organisasi dilakukan dengan pengukuran kinerja terhadap capaian indikator kinerja. Pusdiklat JPPPIW mempunyai 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu Pendidikan dan Pelatihan. Selama periode Renstra 2015-2019 Pusdiklat JPPPIW telah menghasilkan ASN Yang Terdidik sebanyak 1.147 orang (67,47%) dari target 1.700 orang dan ASN Yang Terlatih sebanyak 19.083 orang (139,80%) dari target 13.650 orang.

Pada tahun 2019, Pusdiklat JPPPIW melakukan 9 (sembilan) kali revisi DIPA dengan 3 (tiga) di antaranya dilakukan secara terpusat (seluruh BPSDM) di Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan dan 6 (enam) lainnya dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Barat. DIPA TA 2019 pertama kali terbit pada tanggal 5 Desember 2018 dengan pagu sebesar Rp 34.459.824.000,-. Revisi yang dilakukan di DJA dilakukan untuk mengatasi kekurangan tunjangan kinerja PNS pada Bulan Agustus 2019, penambahan anggaran dari BA-BUN Kementerian Keuangan untuk kegiatan peningkatan kompetensi jabatan fungsional pada bulan November, dan untuk mengatasi kekurangan gaji PNS pada bulan Desember. Sedangkan revisi lainnya dilakukan untuk mengoptimalkan anggaran yang sudah ada.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	14
1.1 LATAR BELAKANG	14
1.2 TUGAS DAN FUNGSI.....	15
1.2.1 TUGAS POKOK ORGANISASI.....	15
1.2.2 FUNGSI ORGANISASI	15
1.3 STRUKTUR ORGANISASI.....	15
1.4 ISU STRATEGIS.....	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	26
2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS	26
2.1.1 VISI	27
2.1.2 MISI.....	28
2.1.3 TUJUAN.....	29
2.1.4 SASARAN.....	29
2.1.5 PROGRAM	29
2.1.6 KEGIATAN.....	33
2.2 PERJANJIAN KINERJA.....	34
2.3 METODE PENGUKURAN	44

2.4	TARGET TAHUN 2019 MENURUT RENSTRA	45
BAB III KAPASITAS ORGANISASI		47
3.1	SUMBER DAYA MANUSIA	47
3.1.1	SDM PUSDIKLAT JPPIW	47
3.1.2	SDM BALAI UJI COBA SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	49
3.2	SARANA DAN PRASARANA	51
3.2.1	SARANA DAN PRASARANA PUSDIKLAT JPPIW	51
3.2.2	SARANA DAN PRASARANA BALAI UJI COBA SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	52
3.3	DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN.....	53
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA		56
4.1	CAPAIAN KINERJA	56
4.1.1	CAPAIAN KINERJA TERHADAP RENCANA KERJA 2019.....	56
4.1.2	CAPAIAN KINERJA TERHADAP RENCANA STRATEGIS 2019....	58
4.2	PERBANDINGAN KINERJA	77
4.3	REALISASI ANGGARAN	78
4.4	ANALISIS KINERJA ORGANISASI	79
4.4.1	METODE ANALISIS	79
4.4.2	Hasil Analisis Organisasi	80
4.4.3	ANALISIS <i>OUTCOME</i>	107
BAB V PENUTUP.....		112
5.1	PERMASALAHAN.....	112
5.2	SARAN TINDAK LANJUT	112



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Target Peningkatan Pembangunan	22
Tabel 2. 1 Target Kinerja Pusdiklat JPPPIW Tahun 2019	45
Tabel 3. 1 SDM Pusdiklat JPPPIW Berdasarkan Pendidikan	48
Tabel 3. 2 SDM Pusdiklat JPPPIW Berdasarkan Jenis Kelamin	48
Tabel 3. 3 SDM Pusdiklat JPPPIW Berdasarkan Golongan	49
Tabel 3. 4 SDM BUCSD JPPPIW Berdasarkan Pendidikan	50
Tabel 3. 5 SDM BUCSD JPPPIW Berdasarkan Jenis Kelamin	50
Tabel 3. 6 SDM BUCSD JPPPIW Berdasarkan Golongan	51
Tabel 3. 7 Sarana dan Prasarana Pusdiklat JPPPIW	52
Tabel 3. 8 Sarana dan Prasarana BUCSD JPPPIW	53
Tabel 3. 9 Revisi Anggaran	54
Tabel 4. 1 Capaian Kinerja Organisasi Pusdiklat JPPPIW	57
Tabel 4. 2 Capaian Kinerja Organisasi BUCSD JPPPIW	58
Tabel 4. 3 Capaian Terhadap Renstra	59
Tabel 4. 4 Realisasi Pusdiklat JPPPIW Berdasarkan DIPA	60
Tabel 4. 5 Realisasi BUCSD JPPPIW Berdasarkan DIPA	61
Tabel 4. 6 Jumlah Angkatan Pelatihan 2019	65
Tabel 4. 7 Jumlah Peserta Pelatihan 2019	66

Tabel 4. 8	Pola dan Teknik Pelatihan.....	67
Tabel 4. 9	Kurikulum dan Modul Pelatihan	67
Tabel 4. 10	Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Pelatihan BUCSD JPPPIW	68
Tabel 4. 11	Perbandingan Kinerja Terhadap Renstra 2015-2019	78
Tabel 4. 12	Rata-Rata Nilai Materi Pelatihan	82
Tabel 4. 13	Rata-Rata Nilai Pengajar	83
Tabel 4. 14	Sistem Manajemen Mutu	84
Tabel 4. 15	Penyusunan Laporan Kinerja	85
Tabel 4. 16	Sinkronisasi Data Rencana Kerja Anggaran.....	86
Tabel 4. 17	Penyusunan Profil Pendidikan dan Pelatihan serta Pengajar Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.....	86
Tabel 4. 18	Rencana dan Realisasi Pelatihan Per Bidang	87
Tabel 4. 19	Rencana dan Realisasi Pelatihan Per Balai.....	88
Tabel 4. 20	Rekapitulasi Data Capaian Pelatihan 2019.....	89
Tabel 4. 21	Kartu Kendali Barang Milik Negara Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, Dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.....	90
Tabel 4. 22	Rincian Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Pelatihan	96
Tabel 4. 23	Rekapitulasi Jumlah Karyasiswa Menurut Program Studi dan Angkatan Program Studi	99
Tabel 4. 24	ASN Pusklat JPPPIW Yang Mengikuti Program Pengembangan Tahun 2019	102
Tabel 4. 25	Hasil Evaluasi Pasca Pelatihan	108



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi di Lingkungan Pusdiklat JPPPIW.....	16
Gambar 2. 1 Peta Strategi Kementerian PUPR	27
Gambar 2. 2 <i>Grand Design</i> Pelatihan Bidang Jalan	31
Gambar 2. 3 <i>Grand Design</i> Pelatihan Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah..	31
Gambar 2. 4 <i>Grand Design</i> Pelatihan Bidang Perumahan	32
Gambar 2. 5 <i>Grand Design</i> Pelatihan Bidang Permukiman	32
Gambar 2. 6 Perjanjian Kinerja Pusdiklat JPPPIW	35
Gambar 2. 7 Lampiran Perjanjian Kinerja Pusdiklat JPPPIW	36
Gambar 2. 8 Revisi Perjanjian Kinerja Pusdiklat JPPPIW	37
Gambar 2. 9 Lampiran Perjanjian Kinerja Pusdiklat JPPPIW	38
Gambar 2. 10 Perjanjian Kinerja BUCSD JJPIW.....	39
Gambar 2. 11 Lampiran Perjanjian Kinerja BUCSD JJPIW	40
Gambar 2. 12 Revisi Perjanjian Kinerja BUCSD JJPIW.....	41
Gambar 2. 13 Revisi Lampiran Perjanjian Kinerja BUCSD JJPIW	42
Gambar 2. 14 Perjanjian Kinerja BUCSD PERKIM	43
Gambar 2. 15 Lampiran Perjanjian Kinerja BUCSD PERKIM.....	44



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 PNS PUPR Berdasarkan Tingkat Pendidikan	23
Grafik 1. 2 PNS PUPR Dengan Pendidikan Teknik dan Non Teknik dengan Jenjang S1, S2, dan S3.....	24
Grafik 1. 3 PNS PUPR Berdasar Usia dan Pendidikan.....	24
Grafik 4. 1 ASN Terdidik 2019	62
Grafik 4. 2 ASN Terdidik 2019 Yang Dibiayai APBN.....	63
Grafik 4. 3 ASN Terdidik 2019 Yang Tidak Dibiayai APBN.....	64
Grafik 4. 4 ASN Terdidik Yang Lulus Di Tahun 2019	64
Grafik 4. 5 Capaian Serapan Anggaran 2015-2019	81
Grafik 4. 6 Rekapitulasi Nilai Materi Pelatihan	82
Grafik 4. 7 Rekapitulasi Nilai Widyaiswara	83
Grafik 4. 8 Kepuasan Pemangku Kepentingan Pada Pusdiklat JPPPIW	84
Grafik 4. 9 Perbandingan Rata-Rata IPK Karyasiswa.....	100
Grafik 4. 16 Indeks Outcome Pusdiklat JPPPIW Periode Tahun 2015-2018.....	111



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Pusdiklat JPPPIW) merupakan salah satu unit kerja setingkat Eselon II pada unit kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Mengacu pada Rencana Strategis Kementerian PUPR, Pusdiklat JPPPIW mempunyai 6 *output* atau sasaran kegiatan, yaitu 1.) Dukungan Manajemen; 2.) ASN Yang Terlatih; 3.) Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Kediklatan; 4.) ASN Yang Terdidik; 5.) Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana; dan 6.) Peralatan dan Perlengkapan yang merepresentasikan keberhasilan pencapaian tujuan program dan kebijakan.

Agar keseluruhan program dan kegiatan Pusdiklat JPPPIW tercapai sesuai dengan rencana target waktu, kuantitas, kualitas, dan tepat sasaran, maka disepakati program dan kegiatan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Eselon II Pusdiklat JPPPIW dengan Eselon I BPSDM.

Penyusunan laporan ini sebagai wujud implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dimana setiap Satuan Unit Kerja Eselon II diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi serta menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) pada setiap akhir tahun.



1.2 TUGAS DAN FUNGSI

1.2.1 TUGAS POKOK ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pusdiklat JPPPIW memiliki tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan, jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.

1.2.2 FUNGSI ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugasnya Pusdiklat JPPPIW menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah;
2. Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan, kerja sama, program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah;
3. Koordinasi dan pembinaan teknis substantif pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah;
4. Penyusunan standarisasi pengajar, sistem atau pola, teknik dan materi pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah;
5. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja dan program serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah; dan
6. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta urusan tata usaha Pusat.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

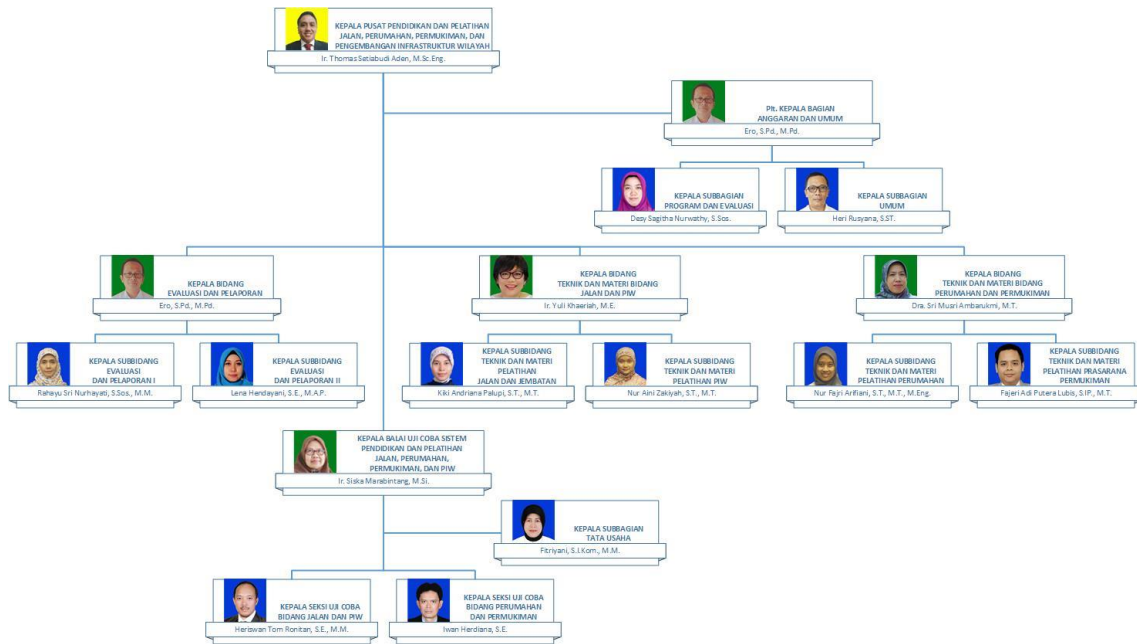
Pusdiklat JPPPIW terdiri atas:

1. Bagian Anggaran dan Umum;
2. Bidang Teknik dan Materi Jalan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;



3. Bidang Teknik dan Materi Perumahan dan Permukiman; dan
4. Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

Struktur organisasi di lingkungan Pusdiklat JPPPIW adalah sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:



Sumber: *Bagian Kepegawaian Pusdiklat JPPPIW*

Gambar 1.1 Struktur Organisasi di Lingkungan Pusdiklat JPPPIW


Adapun tugas dan fungsi internal setiap bagian dan bidang di lingkungan Pusdiklat JPPPIW sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 adalah sebagai berikut:

1. BAGIAN ANGGARAN DAN UMUM

Bagian Anggaran dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, evaluasi kinerja, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Bagian Anggaran dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;

- 
- b. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara; dan
 - c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Bagian Anggaran dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Evaluasi, yang bertugas melakukan penyiapan bahan rencana program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi kinerja dan kegiatan serta pelaporan Pusat; dan
- b. Subbagian Umum, yang bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara serta pelaksanaan rumah tangga Pusat.

2. BIDANG TEKNIK DAN MATERI JALAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

Bidang Teknik dan Materi Jalan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan, kerja sama, program, dan kegiatan, koordinasi dan pembinaan teknis substantif, serta penyusunan standardisasi pengajar, sistem atau pola, teknik dan materi pendidikan dan pelatihan bidang jalan dan jembatan serta pengembangan infrastruktur wilayah.

Bidang Teknik dan Materi Jalan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan dan penyiapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang jalan dan jembatan, serta pengembangan infrastruktur wilayah;
- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan, kerja sama, program, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan bidang jalan dan jembatan, serta pengembangan infrastruktur wilayah;
- c. Penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis substantif pendidikan dan pelatihan bidang jalan dan jembatan, serta pengembangan infrastruktur wilayah; dan
- d. Penyiapan penyusunan dan standardisasi pengajar, sistem atau pola, teknik dan materi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan dan jembatan, serta pengembangan infrastruktur wilayah.



Bidang Teknik dan Materi Jalan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah terdiri atas:

- a. Subbidang Teknik dan Materi Pelatihan Jalan dan Jembatan, yang bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan, kerjasama, rencana kebutuhan, koordinasi dan pembinaan teknis substantif, penyusunan standardisasi pengajar, sistem atau pola teknik pelatihan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta penyusunan pengembangan dan standardisasi kurikulum dan modul pelatihan serta diseminasi bidang jalan dan jembatan.
- b. Subbidang Teknik dan Materi Pelatihan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, yang bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan, kerja sama, rencana kebutuhan, koordinasi dan pembinaan teknis substantif, penyusunan standardisasi pengajar, sistem atau pola teknik pelatihan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta penyusunan pengembangan dan standardisasi kurikulum dan modul pelatihan serta diseminasi bidang pengembangan infrastruktur wilayah.


3. BIDANG TEKNIK DAN MATERI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Bidang Teknik dan Materi Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan, kerja sama, program, dan kegiatan, koordinasi dan pembinaan teknis substantif, serta penyusunan standardisasi pengajar, sistem atau pola, teknik dan materi pendidikan dan pelatihan bidang perumahan dan permukiman.

Bidang Teknik dan Materi Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan dan penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang perumahan dan permukiman;
- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan, kerja sama, program, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan bidang perumahan dan permukiman;
- c. Penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis substantif pendidikan dan pelatihan bidang perumahan dan permukiman; dan



- 
- d. Penyiapan penyusunan dan standardisasi pengajar, sistem atau pola, teknik dan materi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang perumahan dan permukiman.

Bidang Teknik dan Materi Perumahan dan Permukiman terdiri atas:

- a. Subbidang Teknik dan Materi Pelatihan Perumahan, yang bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan, kerja sama, rencana kebutuhan, koordinasi dan pembinaan teknis substantif, penyusunan standardisasi pengajar, sistem atau pola teknik pelatihan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta penyusunan pengembangan dan standardisasi kurikulum dan modul pelatihan serta diseminasi bidang perumahan.
- b. Subbidang Teknik dan Materi Pelatihan Prasarana Permukiman, yang bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan, kerja sama, rencana kebutuhan, koordinasi dan pembinaan teknis substantif, penyusunan standardisasi pengajar, sistem atau pola teknik pelatihan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta penyusunan pengembangan dan standardisasi kurikulum dan modul pelatihan serta diseminasi bidang prasarana permukiman.


4. BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN

Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja dan program, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan, jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.

Bidang Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan, jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah; dan
- b. Penyusunan laporan kinerja dan program serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan, jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.

Bidang Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas:


- 
- a. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan I, yang bertugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang jalan, jembatan, dan pengembangan infrastruktur wilayah.
 - b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan II, yang bertugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang perumahan dan permukiman.

5. BALAI UJI COBA SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas melaksanakan uji coba sistem pendidikan dan pelatihan bidang jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah yang ditetapkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, pelatihan *Crash Program* dan pelatihan hasil inovasi Badan Penelitian dan Pengembangan yang kurikulumnya belum lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan uji coba sistem pendidikan dan pelatihan;
- b. Pelaksanaan uji coba sistem pendidikan dan pelatihan yang meliputi kurikulum, materi, pengajar, peserta, dan sarana prasarana;
- c. Pelaksanaan pelatihan *Crash Program* dan pelatihan hasil inovasi Badan Penelitian dan Pengembangan yang kurikulumnya belum lengkap sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan uji coba sistem pendidikan dan pelatihan;

- 
- f. Penyebarluasan informasi pendidikan dan pelatihan;
 - g. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha, yang bertugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran; evaluasi dan pelaporan Balai; pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, barang milik negara, tata persuratan, tata kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, penerimaan negara bukan pajak, dan urusan rumah tangga Balai.
- b. Seksi Uji Coba Bidang Jalan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, yang bertugas melakukan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penyebarluasan informasi uji coba sistem pendidikan dan pelatihan terhadap sistem pendidikan dan pelatihan bidang jalan dan pengembangan infrastruktur wilayah.
- c. Seksi Uji Coba Bidang Perumahan dan Permukiman, yang bertugas melakukan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penyebarluasan informasi uji coba sistem pendidikan dan pelatihan terhadap sistem pendidikan dan pelatihan bidang perumahan dan permukiman.

1.4 ISU STRATEGIS

Secara umum permasalahan dan potensi pembangunan yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dipandang dapat memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan jika dilakukan secara sistematis. Tantangan yang dihadapi Kementerian PUPR pada saat ini adalah adanya peningkatan sasaran dan target pembangunan, dimana target pembangunan terutama bidang jalan, perumahan,



permukiman yang harus dicapai tahun 2015-2019 meningkat cukup tajam, yaitu sebagaimana digambarkan pada Tabel 1.1 berikut:

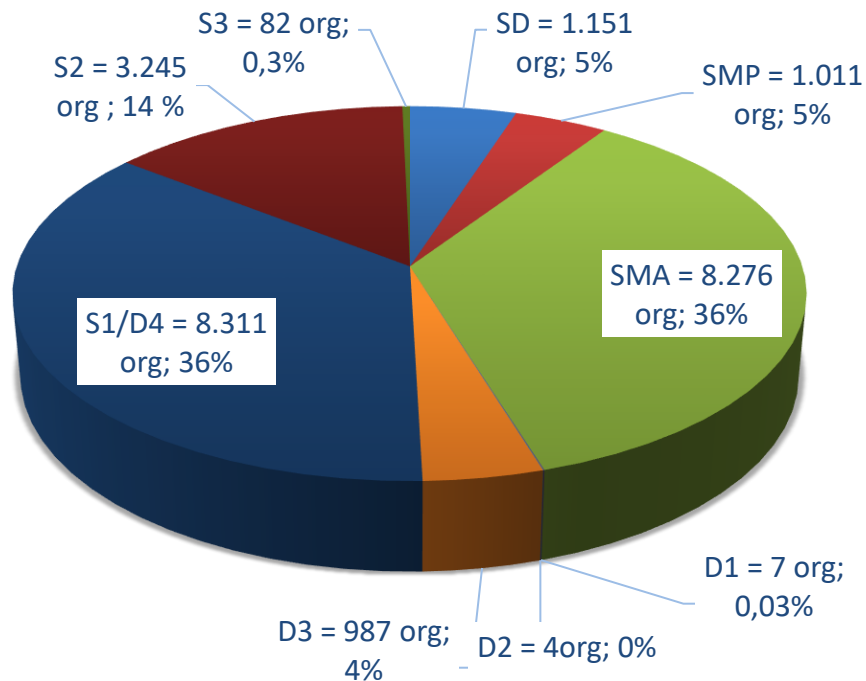
Tabel 1.1 Target Peningkatan Pembangunan

Sektor	Indikator Kinerja	Satuan	2010-2014 (LAKIP KEMENTERIAN PU)		Target 2015-2019	Peningkatan Target (%)
			Target	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7 = 6 / 5
Bina Marga	Pembangunan Jalan Baru (Jalan Nasional)	Km	1.860	4.041	2.650	66%
	Pembangunan Jalan Tol	Km	120	45,6	1.000	2.193%
Cipta Karya	Akses Air Minum Aman Nasional/Layak	%	2%/tahun 2010: 61,17% 2014:70%	2%/tahun 2010: 61,17% 2014:70%	6%/tahun 2015:70% 2019:100%	300%
	Kawasan Kumuh	%	-	-	-	-
	Akses Sanitasi Layak	%	1,2%/tahun 2010: 55,3% 2014: 61,4%	1,2%/tahun 2010: 55,3% 2014: 61,4%	8%/tahun 2015: 61,4% 2019: 100%	660%
Pembiayaan Perumahan	Kekurangan Tempat Tinggal (Backlog)	Unit	-	-	5.000.000	-

Sumber: Diolah dari Data Renstra Kementerian PUPR

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa peningkatan target pembangunan bidang jalan, permukiman, dan perumahan yang harus dicapai pada tahun 2015-2019 sangat tinggi. Untuk mendukung target pembangunan tersebut, diperlukan kerangka pendanaan yang maksimal, bila dilihat perkembangan anggaran Kementerian PUPR tahun 2005-2015, terdapat peningkatan anggaran yang signifikan, yaitu 2005: 15,423 T, 2010: 37,772 T, 2015: 118,446 T. Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi BPSDM mengingat tidak adanya penambahan ASN di lingkungan Kementerian PUPR dengan adanya kebijakan moratorium. Kondisi SDM PUPR yang saat ini merupakan tantangan berat bagi Kementerian PUPR umumnya dalam mewujudkan sasaran Renstra, dan bagi BPSDM khususnya untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian PUPR. Komposisi SDM PUPR berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dari Grafik 1.1 di bawah ini:

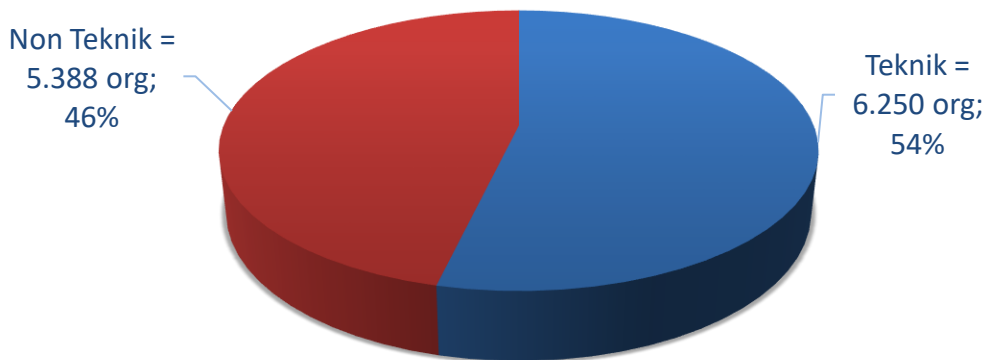




Sumber: Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Grafik 1.1 PNS PUPR Berdasarkan Tingkat Pendidikan

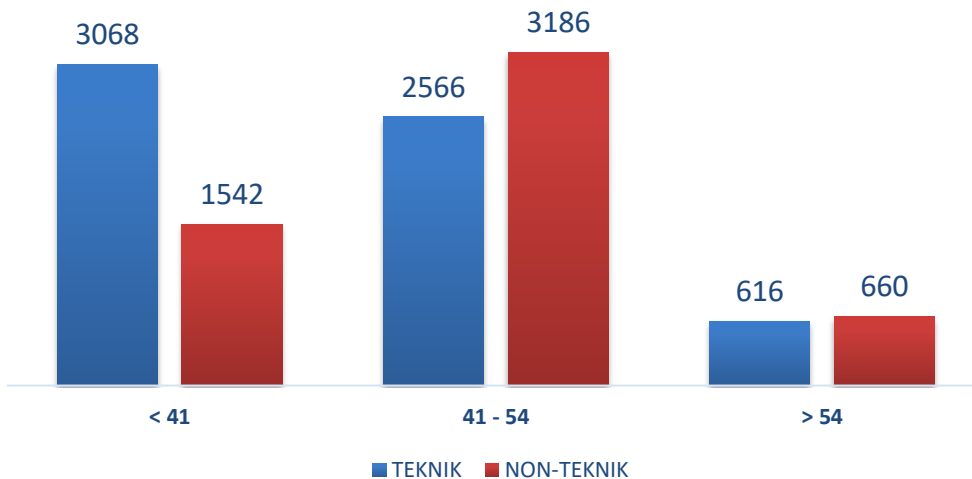
PNS Kementerian PUPR yang memiliki pendidikan S1, S2, dan S3 sebesar 50%, yaitu sebanyak 11.638 orang dari total keseluruhan 23.075 orang PNS Kementerian PUPR. Dari 11.638 orang pegawai tersebut sebesar 54%, yaitu 6.250 orang memiliki fokus pendidikan teknik dan 46%, yaitu 5.388 orang berpendidikan non-teknik. Jumlah PNS Kementerian PUPR berdasarkan fokus pendidikan teknik dan non-teknik disajikan pada Grafik 1.2 berikut:



Sumber: Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Grafik 1.2 PNS PUPR Dengan Pendidikan Teknik dan Non Teknik dengan Jenjang S1, S2, dan S3

Dari 6.250 orang PNS Kementerian PUPR yang memiliki pendidikan teknik S1, S2, dan S3 hanya sebesar 49%, yaitu 3.068 orang pegawai yang masih termasuk ke dalam usia produktif (di bawah usia 41 tahun). Rinciannya dapat dilihat pada Grafik 1.3 berikut:



Sumber: Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Grafik 1.3 PNS PUPR Berdasar Usia dan Pendidikan



Bila dilihat dari tabel di atas bahwa peningkatan target pembangunan dan perkembangan anggaran belum bisa diimbangi oleh kuantitas dan kualitas SDM, sehingga hal ini menjadi kondisi dan tantangan pembangunan bagi Pusdiklat JPPPIW untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian PUPR melalui pendidikan dan pelatihan.



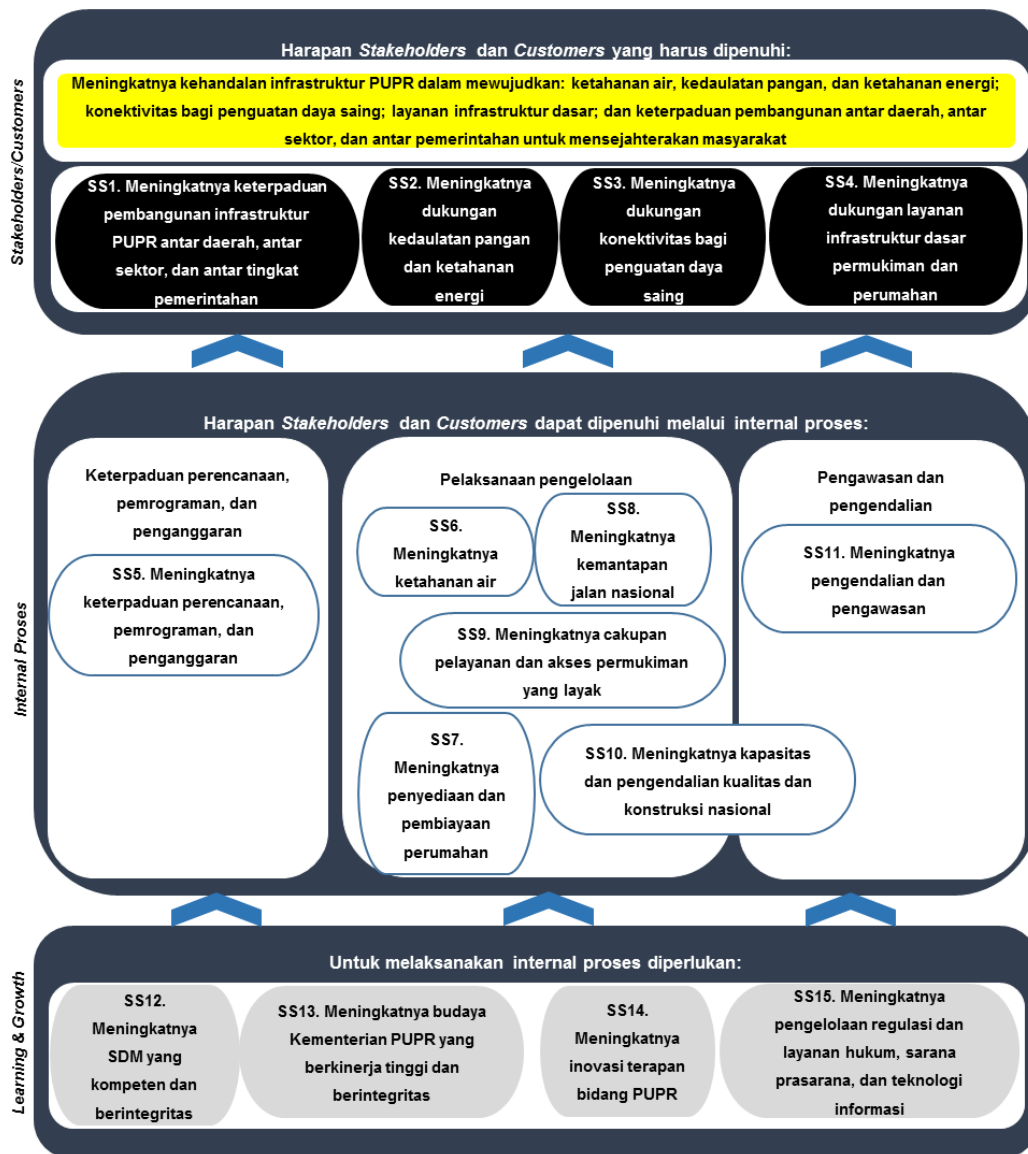


BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS

Kementerian PUPR diharapkan dapat memberikan dampak sesuai dengan harapan dari *stakeholders* atau *customers* yang didefinisikan dalam sasaran strategis (SS1-SS4) diantaranya: 1. SS1, Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan; 2. SS2, Meningkatnya dukungan kehandalan pangan dan ketahanan energi; 3. SS3, Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing; dan 4. SS4, Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan. Dampak yang diharapkan oleh *stakeholders* dan *customers* tersebut dapat dipenuhi melalui proses internal yang baik, efektif, dan efisien, yang dapat didefinisikan dalam sasaran strategis (SS5-SS11) diantaranya: 1. SS5, Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran; 2. SS6, Meningkatnya ketahanan air; 3. SS7, Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan; 4. SS8, Meningkatnya kemantapan jalan nasional; 5. SS9, Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak; 6. SS10, Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kuantitas konstruksi nasional; dan 7. SS11, Meningkatnya pengendalian dan pengawasan.

Proses internal yang dapat menghasilkan produk sesuai dengan kebutuhan dengan *stakeholders* dan *customers* tadi memerlukan adanya perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dari organisasi Kementerian PUPR yang dalam hal ini didefinisikan dalam sasaran strategis (SS12-SS15). Adapun sasaran yang berhubungan dengan BPSDM tentunya adalah Manajemen SDM yang dalam hal ini peningkatan kompetensi SDM yang berintegritas. BPSDM dalam hal mewujudkan SS12 tersebut telah menetapkan sasaran program, yaitu “Meningkatnya SDM yang Kompeten Sesuai Dengan Kompetensi Jabatan”. Uraian tersebut di atas sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2.1 berikut ini:



Sumber: Renstra PUPR 2015-2019

Gambar 2.1 Peta Strategi Kementerian PUPR

2.1.1 VISI

Undang-Undang (UU) Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, sedangkan Misi adalah



rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Dukungan Kementerian PUPR terhadap Visi tersebut adalah melalui pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang andal, inklusif, dan berkelanjutan.

Visi Kementerian PUPR adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk mendukung visi Kementerian PUPR tersebut BPSDM sebagai salah satu unsur organisasi Kementerian PUPR telah menetapkan misi BPSDM.

2.1.2 MISI

Sejalan dengan salah satu misi Kementerian PUPR, yaitu meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan, serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat, maka misi Pusdiklat JPPPIW sebagai unit Eselon II BPSDM adalah sebagai berikut:

“Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Khususnya di Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis, serta Pendidikan Kedinasan”.

dan

“Menyusun Kebijakan Teknis Pengembangan SDM PUPR Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah”.





2.1.3 TUJUAN

Tujuan Pusdiklat JPPPIW adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana pendidikan dan pelatihan bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
3. Menyusun dan mengembangkan kurikulum dan materi diklat bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
4. Membina dan mengembangkan Widyaiswara, dan tenaga pengajar, instruktur, serta fasilitator diklat; dan
5. Memantau, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

2.1.4 SASARAN

Sasaran program Pusdiklat JPPPIW disesuaikan dengan sasaran strategis BPSDM, yaitu “Tersedianya SDM Yang Kompeten Dalam Pembangunan Infrastruktur Yang Handal” dengan indikator sasaran strategis “Persentase SDM PUPR Yang Kompetensinya Sesuai Dengan Persyaratan Jabatan” dalam rangka mencapai tujuan strategis.

2.1.5 PROGRAM

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan. *(Sumber: Renstra PUPR 2015-2019)*

Program pada Pusdiklat JPPPIW sejalan dengan program BPSDM adalah pengembangan SDM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



1. KONSEP PENGEMBANGAN SDM

Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan. Dalam hal pengembangan SDM melalui pendidikan, PNS Kementerian PUPR mendapatkan beasiswa untuk mengikuti pendidikan kedinasan vokasi pada jurusan-jurusan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, sedangkan pengembangan kompetensi melalui pelatihan dilaksanakan melalui metoda klasikal dan non-klasikal.

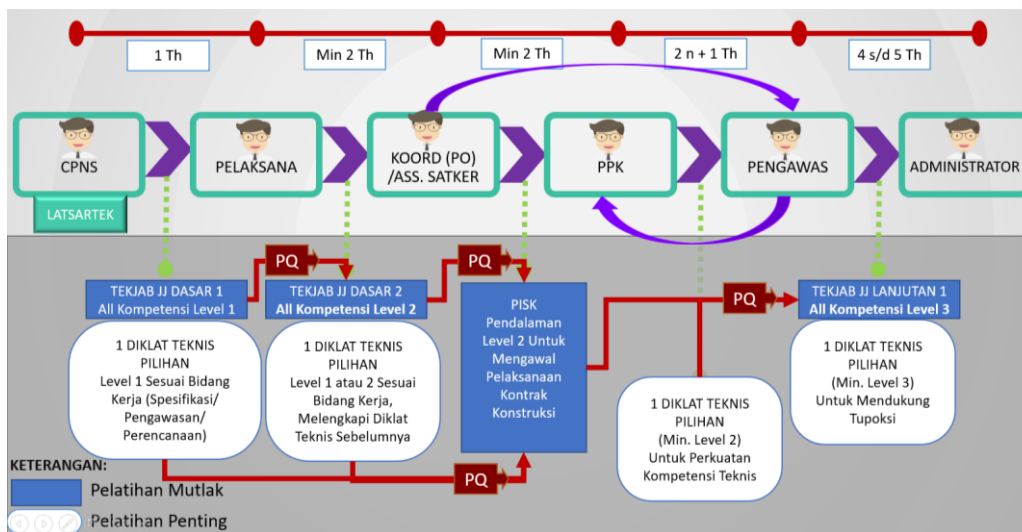
2. PENGEMBANGAN POLA DAN TEKNIK PELATIHAN

Pengembangan kompetensi PNS melalui konsep pelatihan di lingkungan Kementerian PUPR didasarkan pada kebutuhan organisasi dan individu, dimana standar kompetensi merupakan acuan dalam proses pengembangan SDM di Kementerian PUPR. Standar kompetensi yang dimaksud adalah standar kompetensi kerja (SKKNI) maupun standar kompetensi jabatan (berdasarkan tugas dan fungsi).

Pada prinsipnya pola pengembangan kompetensi erat hubungannya dengan pola karir ASN dalam menduduki jabatan tertentu yang terdiri dari:

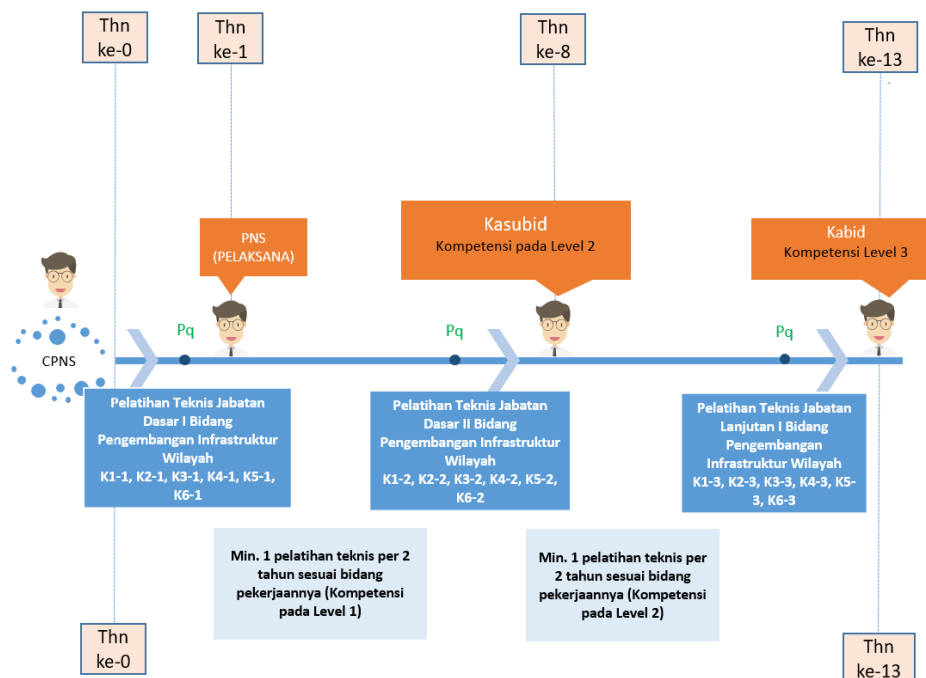
- a. Jabatan Administrasi;
- b. Jabatan Fungsional; dan
- c. Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian PUPR.

Adapun pola pelatihan bidang jalan yang dikembangkan oleh Pusdiklat JPPPIW berdasarkan acuan kompetensi jabatan adalah sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2.2 berikut:



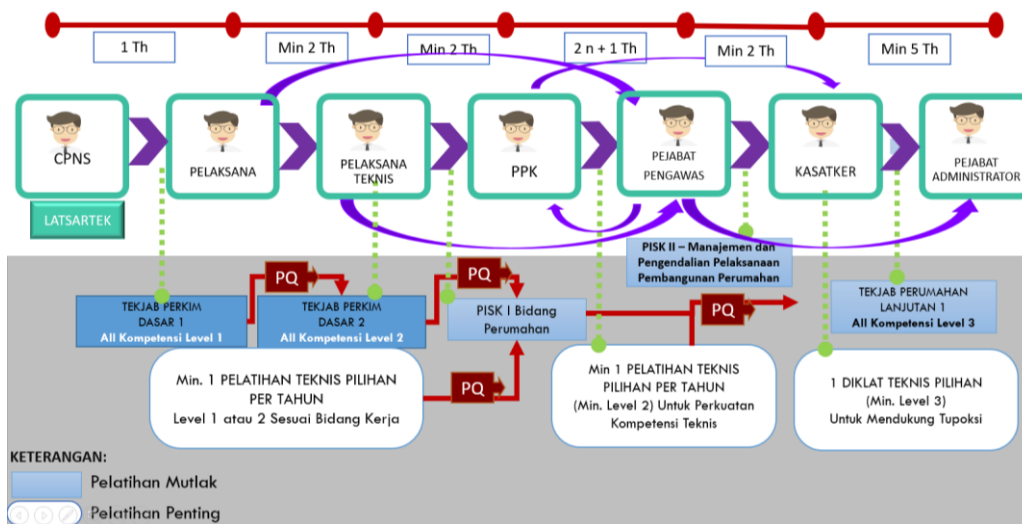
Gambar 2.2 Grand Design Pelatihan Bidang Jalan

Berikut ilustrasi pola pelatihan bidang pengembangan infrastruktur wilayah disajikan pada Gambar 2.3 berikut:



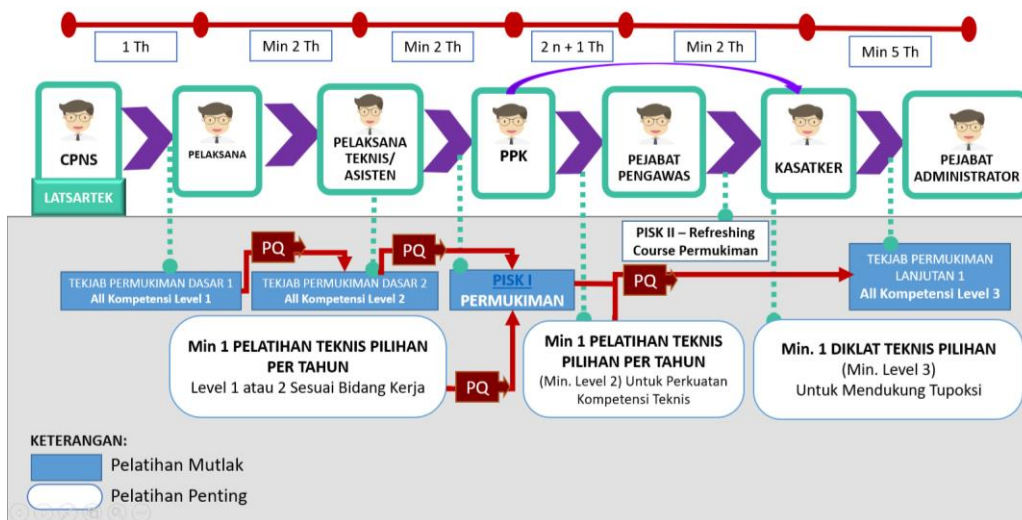
Gambar 2.3 Grand Design Pelatihan Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Berikut ilustrasi pola pelatihan bidang perumahan disajikan pada Gambar 2.4 berikut:




Gambar 2. 4 Grand Design Pelatihan Bidang Perumahan

Berikut ilustrasi pola pelatihan bidang permukiman disajikan pada Gambar 2.5 berikut:



Gambar 2. 5 Grand Design Pelatihan Bidang Permukiman

Mengacu pada standar kompetensi jabatan pada seluruh unit organisasi (Unor) yang menjadi pelanggan Pusdiklat JPPPIW, dianggap perlu dikembangkan teknik pelatihan yang responsif terhadap kebutuhan Unor. Pada tahun anggaran 2019 Pusdiklat JPPPIW



mengembangkan kurikulum dan modul yang lebih dikembangkan pada pembelajaran di tempat kerja diantaranya melalui pengayaan dalam studi kasus, pengembangan animasi, serta mengembangkan teknik pelatihan non-klasikal untuk pengelolaan kesenjangan kompetensi individu.

Grand Design/Roadmap pelatihan masih dalam tahap penyempurnaan sehingga pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Wilayah belum sepenuhnya sesuai dengan pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN bidang bidang jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.

3. PENYUSUNAN/PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN MODUL PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

Mengacu pada uraian butir 2 di atas, tahun 2019 Pusdiklat JPPPIW merencanakan menyusun dan mengembangkan kurikulum dan modul pelatihan berbasis kompetensi (standar kompetensi jabatan) untuk Pelatihan Teknis Jabatan Administrasi dan Kesatkeran.


Disamping itu Pusdiklat JPPPIW juga menyusun dan mengembangkan kurikulum dan modul pelatihan dalam rangka fasilitasi pejabat fungsional meningkatkan kompetensi serta memperoleh sertifikat keahlian berbasis SKKNI yang dikeluarkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) bekerjasama dengan Asosiasi Profesi.

2.1.6 KEGIATAN

Kegiatan didefinisikan penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Eselon II di BPSDM. Kegiatan yang dilakukan oleh Pusdiklat JPPPIW adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.

Indikator kinerja kegiatan Pusdiklat JPPPIW berdasarkan Renstra adalah:

1. Jumlah laporan perencanaan umum, program dan anggaran;
2. Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran dan sarpras;
3. Jumlah laporan pembinaan tenaga pengajar;
4. Jumlah laporan kebutuhan akan diklat;

- 
5. Jumlah laporan pasca pelatihan;
 6. Jumlah laporan monev pelatihan;
 7. Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan (dalam negeri/luar negeri);
 8. Jumlah dokumen pola dan teknik pelatihan;
 9. Jumlah dokumen kurikulum dan modul pelatihan;
 10. Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan (dalam negeri/luar negeri);
 11. Jumlah pembangunan, peningkatan, renovasi sarana dan prasarana; dan
 12. Jumlah peralatan dan perlengkapan.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Berdasarkan hal tersebut, Menteri PUPR memberi amanah kepada Kepala BPSDM yang selanjutnya diturunkan kepada Kepala Pusdiklat JPPPIW untuk melaksanakan program pengembangan SDM PUPR bidang jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah dengan target dan indikator kerjanya dituangkan pada dokumen Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018, dokumen perjanjian kinerja terdiri atas:

1. Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu;
2. Tanggal ditandatanganinya pernyataan perjanjian kinerja; dan
3. Tanda tangan para pihak yang berjanji.

Perjanjian Kinerja Unit Kerja menyajikan informasi sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target dan anggaran, serta tanda tangan para pihak yang berjanji

Perjanjian Kinerja Pusdiklat JPPPIW antara Kepala Pusdiklat JPPPIW sebagai pihak pertama dan Kepala BPSDM sebagai pihak kedua yang ditandatangani pada bulan Januari tahun 2019. Berikut perjanjian kinerja Pusdiklat JPPPIW Tahun 2019 pada Gambar 2.6:



Sumber: Arsip Pusdiklat JPPPIW

Gambar 2.6 Perjanjian Kinerja Pusdiklat JPPPIW

Pada Perjanjian Kinerja Pusdiklat JPPPIW terdapat 6 (enam) sasaran kegiatan di dalamnya, yaitu 1.) ASN yang Terlatih; 2.) Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Kediklatan; 3.) ASN yang Terdidik; 4.) Layanan Sarana dan Prasarana Internal; 5.) Layanan Dukungan Manajemen Satker; dan 6.) Layanan Perkantoran, serta terdapat 10 (sepuluh) indikator kinerja, yaitu 1.) Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri); 2.) Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan; 3.) Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan; 4.) Jumlah Dokumen Uji Coba Kurikulum dan Modul Kediklatan; 5.) Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri); 6.) Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; 7.) Jumlah Pengadaan Perangkat Fasilitas Perkantoran; 8.) Luas Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan; 9.) Jumlah Layanan Manajemen Operasional satuan Kerja; dan

10.) Jumlah Layanan Perkantoran. Sebagaimana lampiran perjanjian kinerja pada Gambar 2.7 berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA – KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT			
NO (1)	SASARAN KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
I	Sasaran Kegiatan: Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang ditingkatkan kompetensinya	Jumlah SDM PUPR Bidang Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang ditingkatkan kompetensinya	3.045 Orang
OUTPUT:			
1	ASN yang Terlatih	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	2.940 Orang
2	Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan	1. Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan 2. Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan 3. Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan yang Diujicobakan	4 Dokumen 7 Dokumen 16 Dokumen
3	ASN yang Terdidik	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	105 Orang
4	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1. Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor 2. Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 3. Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 4. Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	1 Layanan
5	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Jumlah Layanan Manajemen Operasional Satuan Kerja	1 Layanan
6	Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran (12 Bulan)	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	- Satker : Rp 34.459.824.000,- - Pelatihan Balai Diklat PUPR Wilayah I-IX : Rp 53.026.263.000,- - Kurikulum dan Modul Kediklatan yang Diujicobakan Balai Uji Coba Sistem Diklat Jalan dan PIW : Rp 7.200.000.000,- - Kurikulum dan Modul Kediklatan yang Diujicobakan Balai Uji Coba Sistem Diklat Perumahan Permukiman : Rp 7.159.060.000,-

Pihak Kedua  LOLLI MARTINA MARTIEF	Jakarta, Januari 2019 Pihak Pertama  THOMAS SETIABUDI ADEN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Arsip Pusdiklat JPPPIW

Gambar 2.7 Lampiran Perjanjian Kinerja Pusdiklat JPPPIW

Untuk optimalisasi anggaran maka Pusdiklat JPPPIW melakukan beberapa revisi anggaran, sehingga perjanjian kinerja perlu dilakukan revisi. Berikut revisi Perjanjian Kinerja Pusdiklat JPPPIW pada Gambar 2.8:



Sumber: Arsip Pusdiklat JPPPIW

Gambar 2. 8 Revisi Perjanjian Kinerja Pusdiklat JPPPIW

Tidak terjadi perubahan pada sasaran kegiatan dan indikator kinerja, namun target kinerja mengalami perubahan, yaitu target pada indikator kinerja Jumlah SDM PUPR Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang ditingkatkan kompetensinya semula sebanyak 3.045 orang menjadi 3.075 orang. Perubahan tersebut terdiri dari indikator kinerja Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri) dengan target semula sebanyak 2.940 orang menjadi 2.970 orang dan indikator kinerja Jumlah Dokumen Uji Coba Kurikulum Dan Modul Kediklatan semula sebanyak 16 laporan menjadi 15 laporan. Sebagaimana Gambar 2.9 berikut:



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA – KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL	TARGET REVISI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sasaran Kegiatan: Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang ditingkatkan kompetensinya	Jumlah SDM PUPR Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang ditingkatkan kompetensinya	3.045 Orang	3.075 Orang
OUTPUT:				
1	ASN yang Terlatih	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	2.940 Orang	2.970 Orang
2	Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan	1. Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan	4 Dokumen	4 Dokumen
		2. Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan	7 Dokumen	7 Dokumen
		3. Jumlah Dokumen Uji Coba Kurikulum dan Modul Kediklatan	16 Dokumen	15 Dokumen
3	ASN yang Terdidik	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	105 Orang	105 Orang
4	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1. Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1 Layanan	1 Layanan
		2. Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran		
		3. Luas Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan		
5	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Jumlah Layanan Manajemen Operasional Satuan Kerja	1 Layanan	1 Layanan
6	Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran (12 Bulan)	1 Layanan	1 Layanan

Kegiatan

1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

- Satker Pusdiklat JPPPIW : Rp 34.459.824.000,-

- Pelatihan Balai Diklat PUPR Wilayah I - IX : Rp 53.026.263.000,-

- Kurikulum dan Modul Kediklatan Uji Coba : Rp 14.359.060.000,-

Anggaran Awal

Rp 34.459.824.000,-

Rp 53.026.263.000,-

Rp 14.359.060.000,-

Anggaran Revisi

Rp 37.644.824.000,-

Rp 21.445.314.000,-

Rp 8.572.041.000,-

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Jakarta, Desember 2019

Pihak Pertama

THOMAS SETIABUDI ADEN

Sumber: Arsip Pusdiklat JPPPIW

Gambar 2.9 Lampiran Perjanjian Kinerja Pusdiklat JPPPIW

Perjanjian Kinerja Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Jalan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BUCSD JJPIW) antara Kepala BUCSD JJPIW sebagai pihak pertama dan Kepala Pusdiklat JPPPIW sebagai pihak kedua yang ditandatangani pada bulan Januari tahun 2019. Berikut perjanjian kinerja BUCSD JJPIW Tahun 2019 pada Gambar 2.10:





Sumber: Arsip BUCSD JJPIW

Gambar 2. 10 Perjanjian Kinerja BUCSD JJPIW

Pada Perjanjian Kinerja BUCSD JJPIW terdapat 4 (empat) sasaran kegiatan di dalamnya, yaitu 1.) Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Pelatihan; 2.) Layanan Sarana dan Prasarana Internal; 3.) Layanan Dukungan Manajemen Satker; dan 4.) Layanan Perkantoran, serta terdapat 4 (empat) indikator kinerja, yaitu 1.) Jumlah Dokumen Uji Coba Kurikulum dan Modul Pelatihan; 2.) Jumlah Peralatan dan Perlengkapan; 3.) Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker; dan 4.) Layanan Perkantoran. Sebagaimana lampiran perjanjian kinerja pada Gambar 2.11 berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI UJI COBA SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah			
1.	Pola Teknik, Kurikulum dan Modul Pelatihan	Jumlah Dokumen Uji Coba Kurikulum dan Modul Pelatihan	8 Dokumen
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	1 Layanan
3.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Operasional Satuan Kerja	1 Layanan
4.	Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan :
1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Anggaran :
Rp 14,337,121,000

Bandung, Januari 2019

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Sumber: Arsip BUCSD JJPIW

Gambar 2. 11 Lampiran Perjanjian Kinerja BUCSD JJPIW

Untuk optimalisasi anggaran maka BUCSD JJPIW melakukan beberapa revisi anggaran, sehingga perjanjian kinerja perlu dilakukan revisi. Berikut revisi Perjanjian Kinerja BUCSD JJPIW pada Gambar 2.12:



	REVISI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BALAI UJI COBA SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:</p>	
Nama :	SISKA MARABINTANG
Jabatan :	KEPALA BALAI UJI COBA SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA	
Nama :	THOMAS SETIABUDI ADEN
Jabatan :	KEPALA PUSDIKLAT JALAN, PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA	
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA	
sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:	
<ol style="list-style-type: none">1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
<p>Pihak Kedua</p>  THOMAS SETIABUDI ADEN	<p>Bandung, Desember 2019</p> <p>Pihak Pertama</p>  SISKA MARABINTANG

Sumber: Arsip BUCSD JJPIW

Gambar 2. 12 Revisi Perjanjian Kinerja BUCSD JJPIW

Tidak terjadi perubahan pada sasaran kegiatan, indikator kinerja, maupun target, namun dalam upaya optimalisasi maka anggaran BUCSD JJPIW berkurang. Sebagaimana Gambar 2.13 berikut:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

BALAI UJI COBA SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REVISI

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah			
1.	Pola Teknik, Kurikulum dan Modul Pelatihan	Jumlah Dokumen Uji Coba Kurikulum dan Modul Pelatihan	8 Dokumen
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	1 Layanan
3.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Operasional Satuan Kerja	1 Layanan
4.	Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan


Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Anggaran Awal: **Anggaran Revisi:**
Rp 14,337,121,000 Rp 13,483,684,000


Bandung, Desember 2019

PIHAK KEDUA



(THOMAS SETIABUDI ADEN)

PIHAK PERTAMA



(SISKA MARABINTANG)

Sumber: Arsip BUCSD JJPIW

Gambar 2. 13 Revisi Lampiran Perjanjian Kinerja BUCSD JJPIW

Sama halnya dengan BUCSD JJPIW, Perjanjian Kinerja Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Perumahan dan Permukiman (BUCSD PERKIM) adalah antara Kepala BUCSD PERKIM sebagai pihak pertama dan Kepala Pusdiklat JPPPIW sebagai pihak kedua yang ditandatangani pada bulan Januari tahun 2019. Berikut perjanjian kinerja BUCSD PERKIM Tahun 2019 pada Gambar 2.14:



Sumber: Arsip BUCSD PERKIM

Gambar 2. 14 Perjanjian Kinerja BUCSD PERKIM

Berbeda dengan BUCSD JJPIW, pada Perjanjian Kinerja BUCSD PERKIM terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, serta terdapat 5 (lima) *output* di dalamnya, yaitu 1.) Layanan Pendidikan; 2.) Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Pelatihan; 3.) Layanan Sarana dan Prasarana Internal; 4.) Layanan Dukungan Manajemen Satker; dan 5.) Layanan Perkantoran. Sebagaimana lampiran perjanjian kinerja pada Gambar 2.15 berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI UJI COBA SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET
1	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Layanan Pendidikan	10 Orang
		Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Pelatihan	8 Dokumen
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
		Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan
 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Anggaran
 15.153.817.000

Bandung, Januari 2019

Pihak Kedua


 Thomas Setiabudi Aden

Pihak Pertama


 Muhadi

Sumber: Arsip BUCSD PERKIM

Gambar 2. 15 Lampiran Perjanjian Kinerja BUCSD PERKIM

BUCSD PERKIM tidak melakukan revisi Perjanjian Kinerja dikarenakan pada bulan Oktober telah berubah nomenklatur menjadi Politeknik Pekerjaan Umum. Selanjutnya tugas dan fungsi BUCSD PERKIM melekat pada BUCSD JJPIW yang berubah nomenklatur menjadi Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BUCSD JPPPIW).

2.3 METODE PENGUKURAN

Pengukuran kinerja setiap pelaksanaan program dan kegiatan menjadi sangat penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai terhadap target yang telah direncanakan. Pengukuran kinerja Pusdiklat JPPPIW secara umum dilakukan dengan membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan dengan menggunakan metode *Balanced Scorecard (BSC)*.



BSC merupakan suatu konsep manajemen yang menekankan pada pengukuran keuangan dan non-keuangan yang mampu menerjemahkan visi serta strategi organisasi ke dalam suatu tindakan yang nyata di lapangan. Sehingga *balanced scorecard* menjadi salah satu alat manajemen yang terbukti membantu dalam mengimplementasikan strategi bisnis. Secara umum terdapat 4 (empat) macam kinerja bisnis yang diukur dalam *balanced scorecard*, yaitu:

1. *Financial perspective* (perspektif keuangan)
2. *Customer perspective* (perspektif pelanggan)
3. *Internal process perspective* (perspektif proses bisnis internal)
4. *Learning/growth perspective* (perspektif pembelajaran dan pertumbuhan)

Sasaran kegiatan Pusdiklat JPPPIW dicapai melalui beberapa kegiatan yang dilaksanakan di 4 (empat) bagian/bidang Pusdiklat JPPPIW. Perhitungan capaian kegiatan dihitung berdasarkan perbandingan capaian dan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

2.4 TARGET TAHUN 2019 MENURUT RENSTRA

Target Kinerja Pusdiklat JPPPIW tahun 2019 berdasarkan Rencana Strategis 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Target Kinerja Pusdiklat JPPPIW Tahun 2019

Sasaran/Indikator Kinerja		Satuan	Target Renstra Tahun 2019	Target Reviu Renstra Tahun 2019
1	Dukungan Manajemen	Laporan	106	0
	1 Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran	Laporan	2	0
	2 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Saprass	Laporan	1	0
	3 Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar	Laporan	1	0
	4 Jumlah Laporan KAD	Laporan	1	0
	5 Jumlah Laporan Pasca Pelatihan	Laporan	1	0
	6 Jumlah Laporan Monev Pelatihan	Laporan	100	0
2	ASN Yang Terlatih	Orang	2.850	2.850





Sasaran/Indikator Kinerja		Satuan	Target Renstra Tahun 2019	Target Reviu Renstra Tahun 2019
1	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	Orang	2.850	2.850
Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Kediklatan		Dokumen	12	43
3	1 Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan	Dokumen	2	3
	2 Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan	Dokumen	10	12
	3 Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan Yang Diujicobakan	Dokumen	-	28
ASN Yang Terdidik		Orang	350	369
4	1 Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	Orang	350	369
Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana		M ²	0	0
5	1 Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana	M ²	0	0
Peralatan dan Perlengkapan		Unit	10	0
6	1 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	Unit	10	0
7	Layanan Internal (<i>Overhead</i>)	Layanan	-	3
8	Layanan Perkantoran	Bulan	-	12

Sumber: Renstra PUPR 2015-2019 (Permen PUPR No. 13.1/PRT/M/2015 dan Permen PUPR No.8/PRT/M/2018)





BAB III KAPASITAS ORGANISASI

3.1 SUMBER DAYA MANUSIA

3.1.1 SDM PUSDIKLAT JPPPIW

Pegawai yang ada di Pusdiklat JPPPIW menjadi SDM kunci dalam mencapai *outcome* program pengembangan SDM PUPR bidang jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah. Oleh karena itu, untuk mencapai peningkatan persentase kompetensi SDM PUPR bidang jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari kerja keras Pegawai internal di Pusdiklat JPPPIW. Kepiawaian Pegawai Pusdiklat JPPPIW dalam meningkatkan kapasitas SDM PUPR bidang jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah yang membutuhkan pengembangan kompetensi merupakan bentuk komitmen untuk mencetak SDM PUPR bidang jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah yang kompeten dalam menghasilkan produk infrastruktur PUPR yang handal.

Pusdiklat JPPPIW memiliki Pegawai sebanyak 84 orang, terdiri dari 33 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 30 orang Pegawai Harian (PH), dan 21 orang Konsultan Individu (KI). Tingkat pendidikan terendah untuk PNS, yaitu tingkat SMA dan tingkat pendidikan tertinggi, yaitu S2, untuk PH tingkat pendidikan terendah, yaitu tingkat SMP dan tingkat pendidikan tertinggi, yaitu S2, sedangkan untuk KI tingkat pendidikan terendah, yaitu tingkat D3 dan tingkat pendidikan tertinggi, yaitu S2. Gambaran kondisi SDM internal Pusdiklat JPPPIW berdasarkan tingkat pendidikan lebih lengkap disajikan pada tabel 3.1 berikut:



Tabel 3.1 SDM Pusdiklat JPPPIW Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	PNS		PH		KI		Total	
	Orang	%	Orang	%	Orang	%	Orang	%
SMP	-	-	1	3	-	-	1	1
SMA	4	12	8	27	-	-	12	14
D3	1	3	4	13	1	5	6	7
S1	11	33	16	54	19	90	46	55
S2	17	52	1	3	1	5	19	23
Jumlah	33	100	30	100	21	100	84	100

Sumber: Kepegawaian Pusdiklat JPPPIW

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Pusdiklat JPPPIW terdiri dari 38 orang laki-laki dan 45 orang perempuan. Berikut gambaran kondisi SDM internal Pusdiklat JPPPIW berdasarkan jenis kelamin lebih rinci disajikan pada Tabel 3.2:

Tabel 3.2 SDM Pusdiklat JPPPIW Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	PNS		PH		KI		Total	
	Orang	%	Orang	%	Orang	%	Orang	%
Laki-laki	15	45	14	47	10	48	39	46
Perempuan	18	55	16	53	11	52	45	54
Jumlah	33	100	30	100	21	100	84	100

Sumber: Kepegawaian Pusdiklat JPPPIW

Berdasarkan golongan, pegawai Pusdiklat JPPPIW terdiri dari 1 orang golongan I, 18 orang golongan II, 58 orang golongan III, dan 7 orang golongan IV. Berikut gambaran kondisi SDM internal Pusdiklat JPPPIW berdasarkan golongan lebih rinci disajikan pada Tabel 3.3:





Tabel 3. 3 SDM Pusdiklat JPPPIW Berdasarkan Golongan

Golongan	PNS		PH		KI		Total	
	Orang	%	Orang	%	Orang	%	Orang	%
I	-	-	1	3	-	-	1	1
II	5	15	12	40	1	5	18	22
III	22	67	17	57	19	90	58	69
IV	6	18	-	-	1	5	7	8
Jumlah	33	100	30	100	21	100	84	100

Sumber: Kepegawaian Pusdiklat JPPPIW

3.1.2 SDM BALAI UJI COBA SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pusdiklat JPPPIW didukung oleh Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan infrastruktur Wilayah (BUCSD JPPPIW). BUCSD JPPPIW memiliki pegawai sebanyak 36 orang, terdiri dari 20 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 12 orang Pegawai Harian (PH), dan 4 orang Konsultan Individu (KI). Tingkat pendidikan terendah untuk PNS, yaitu tingkat SMP dan tingkat pendidikan tertinggi, yaitu S2, untuk PH tingkat pendidikan terendah, yaitu tingkat SMA dan tingkat pendidikan tertinggi, yaitu S1, sedangkan semua KI berpendidikan S1. Gambaran kondisi SDM BUCSD JJPIW berdasarkan tingkat pendidikan lebih lengkap disajikan pada Tabel 3.4 berikut:





Tabel 3. 4 SDM BUCSD JPPPIW Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	PNS		PH		KI		Total	
	Orang	%	Orang	%	Orang	%	Orang	%
SMP	1	5	-	-	-	-	1	
SMA	10	50	9	75	-	-	19	
D3	1	5	1	8	-	-	2	
S1	5	25	2	17	4	100	11	
S2	3	15	-	-	-	-	3	
Jumlah	20	100	12	100	4	100	36	100

Sumber: Kepegawaian BUCSD JPPPIW

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai BUCSD JPPPIW terdiri dari 25 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Berikut gambaran kondisi SDM BUCSD JPPPIW berdasarkan jenis kelamin lebih rinci disajikan pada Tabel 3.5:

Tabel 3. 5 SDM BUCSD JPPPIW Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	PNS		Pegawai Harian		KI		Total	
	Orang	%	Orang	%	Orang	%	Orang	%
Laki-laki	14	70	10	83	1	25	25	69
Perempuan	6	30	2	17	3	75	11	31
Jumlah	20	100	12	100	4	100	36	100

Sumber: Kepegawaian BUCSD JPPPIW

Berdasarkan golongan, pegawai BUCSD JPPPIW terdiri dari 1 orang golongan I, 21 orang golongan II, 13 orang golongan III, dan 1 orang golongan IV. Berikut gambaran kondisi SDM BUCSD JJPIW berdasarkan golongan lebih rinci disajikan pada Tabel 3.6:





Tabel 3. 6 SDM BUCSD JPPPIW Berdasarkan Golongan

Golongan	PNS		PH		KI		Total	
	Orang	%	Orang	%	Orang	%	Orang	%
I	1	15	-	-	-	-	1	3
II	11	55	10	83	-	-	21	58
III	7	35	2	17	4	100	13	36
IV	1	5	-	-	-	-	1	3
Jumlah	20	100	12	100	4	100	36	100

Sumber: Kepegawaian BUCSD JPPPIW

Dengan adanya keterbatasan jumlah pegawai di lingkungan Pusdiklat JPPPIW tersebut tidak menyurutkan semangat dan komitmen Pusdiklat JPPPIW dalam melaksanakan program pengembangan SDM PUPR bidang jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah di Kementerian PUPR. Setiap kegiatan yang dilaksanakan selalu diupayakan terselenggara secara optimal guna memberikan pelayanan prima kepada para *stakeholders*, khususnya terkait peningkatan kompetensi SDM PUPR bidang jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.

3.2 SARANA DAN PRASARANA

3.2.1 SARANA DAN PRASARANA PUSDIKLAT JPPPIW

Proses pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat JPPPIW sudah tentu didukung oleh fasilitas sarana dan prasarana (Sarpras) yang tersedia. Untuk menunjang kelangsungan program pengembangan SDM PUPR bidang jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah Pusdiklat JPPPIW memiliki aset berupa gedung, kendaraan dinas, dan sarpras lainnya. Aset tersebut terdiri dari 1 unit gedung kantor, 4 unit rumah negara, 1 unit gedung asrama, 3 unit kendaraan roda empat, 6 unit kendaraan roda dua, dan 3.162 unit peralatan dan mesin. Berikut rincian aset Pusdiklat JPPPIW disajikan pada Tabel 3.10 di bawah ini:





Tabel 3.7 Sarana dan Prasarana Pusdiklat JPPPIW

No	Nama Barang	Satuan	Kondisi	Kuantitas	Luas/Satuan (m ²)	Jumlah Lantai/Satuan
1	Bangunan Gedung Kantor	Unit	Baik	1	2.570	2
2	Bangunan Gedung Asrama	Unit	Baik	1	2.570	3
3	Rumah Negara Golongan I Tipe B	Unit	Baik	1	120	1
4	Rumah Negara Golongan I Tipe D	Unit	Baik	3	90	1
5	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	Baik	3	-	-
6	Sepeda Motor	Unit	Baik	6	-	-
7	Peralatan dan Mesin	Unit	Baik	3.162	-	-

Sumber: Laporan SIMAK BMN Pusdiklat JPPPIW

3.2.2 SARANA DAN PRASARANA BALAI UJI COBA SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BUCSD JPPPIW) memiliki aset berupa 1 unit gedung kantor, 3 unit gedung asrama, 1 unit rumah negara, 1 unit gedung pos jaga, 1 unit kendaraan roda enam, 4 unit kendaraan roda empat, 6 unit kendaraan roda dua, dan 2.467 unit peralatan dan mesin. Berikut rincian aset BUCSD JPPPIW disajikan pada Tabel 3.11 di bawah ini:





Tabel 3. 8 Sarana dan Prasarana BUCSD JPPPIW

No	Nama Barang	Satuan	Kondisi	Kuantitas	Luas/Satuan (m ²)	Jumlah Lantai/Satuan
1	Bangunan Gedung Kantor dan Asrama	Unit	Baik	1	2.463	2
2	Bangunan Gedung Asrama Tjokorda	Unit	Baik	1	875	2
3	Bangunan Gedung Asrama Sutami I	Unit	Baik	1	1.050	2
4	Bangunan Gedung Asrama Sutami II	Unit	Baik	1	1.100	2
5	Rumah Negara Golongan I Tipe D	Unit	Baik	1	90	1
6	Gedung Pos Jaga	Unit	Baik	1	9	1
7	Bus	Unit	Baik	1	-	-
8	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	Baik	3	-	-
		Unit	Rusak Berat	1	-	-
9	Sepeda Motor	Unit	Baik	3	-	-
		Unit	Rusak Berat	3	-	-
10	Peralatan dan Mesin	Unit	Baik	2.467	-	-

Sumber: Laporan SIMAK BMN BUCSD JPPPIW

3.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Pada tahun 2019 Pusdiklat JPPPIW mendapatkan amanah pagu anggaran sebesar Rp 34.459.824.000,- (Tiga Puluh Empat Miliar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah). Dalam pelaksanaannya, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusdiklat JPPPIW mengalami beberapa revisi dikarenakan adanya optimalisasi anggaran, sehingga pada akhir tahun anggaran pagu Pusdiklat JPPPIW bertambah menjadi sebesar Rp 37.644.824.000,-. Rekapitulasi perubahan pagu per *output* tersebut disajikan pada Tabel 3.9 berikut:



Tabel 3. 9 Revisi Anggaran*(dalam juta rupiah)*

No	Output	Awal	Revisi ke-1	Revisi ke-2	Revisi ke-3	Revisi ke-4	Revisi ke-5	Revisi ke-6	Revisi ke-7	Revisi ke-8	Revisi ke-9
1	Layanan Pendidikan	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.149	6.149	6.149
2	Layanan Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Pelatihan	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	5.976	5.976	5.976
4	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4.857	4.857	4.857	4.857	4.857	4.857	4.857	4.857	4.857	4.857
5	Layanan Dukungan Manajemen Satker	7.334	6.894	6.894	6.894	6.894	6.894	7.444	7.369	7.369	7.369
6	Layanan Perkantoran	10.218	10.658	10.658	13.193	13.193	13.193	13.193	13.193	13.293	13.293
Total		34.459	34.459	34.459	36.994	36.994	36.994	37.544	37.544	37.644	37.644

Sumber: Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2019 Nomor: SP DIPA-033.15.1.400837/2019

Revisi anggaran pertama dan kedua yang dilakukan Pusdiklat JPPPIW hanya menggeser pagu per *output* atau sasaran kegiatan, revisi ini tidak menambah atau mengurangi anggaran keseluruhan. Barulah pada revisi anggaran ketiga Pusdiklat JPPPIW menambah pagu anggaran sebesar Rp 2.535.000.000,- untuk memenuhi kekurangan tunjangan kinerja pegawai. Sama seperti revisi anggaran pertama dan kedua, revisi anggaran keempat dan kelima yang dilakukan Pusdiklat JPPPIW tidak menambah atau mengurangi pagu anggaran, melainkan hanya menggeser pagu per *output* atau sasaran kegiatan. Kemudian pada revisi anggaran keenam Pusdiklat JPPPIW mendapatkan tambahan anggaran dari BA-BUN Kementerian Keuangan sebesar Rp 550.000.000,- untuk keperluan kegiatan pengembangan kompetensi jabatan fungsional di lingkungan Pusdiklat JPPPIW. Selanjutnya revisi anggaran ketujuh yang dilakukan Pusdiklat JPPPIW tidak menambah atau mengurangi pagu anggaran namun untuk mengakomodir pagu minus yang terjadi selama tahun anggaran 2019. Pada revisi anggaran kedelapan Pusdiklat JPPPIW menambah pagu anggaran sebesar Rp 100.000.000,- untuk memenuhi kekurangan gaji pegawai. Terakhir revisi kesembilan



Pusdiklat JPPPIW dilakukan guna menyinkronkan data dengan Kementerian Keuangan agar pada laporan akhir tidak terdapat perberdaan.





BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

4.1 CAPAIAN KINERJA

4.1.1 CAPAIAN KINERJA TERHADAP RENCANA KERJA 2019

Capaian kinerja organisasi dilakukan dengan pengukuran kinerja terhadap capaian indikator kinerja tahun 2019. Dari indikator kinerja yang ada, Pusdiklat JPPPIW membagi menjadi dua jenis indikator kinerja, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penunjang (IKP). IKU adalah indikator kinerja yang menjadi tugas utama Pusdiklat JPPPIW, yaitu ASN Yang Terdidik dan ASN Yang Terlatih. Sedangkan IKP merupakan indikator kinerja dari tugas lainnya yang menunjang tugas utama, yaitu 1.) Pengembangan, Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Pelatihan; 2.) Layanan Sarana dan Prasarana Internal; 3.) Layanan Dukungan Manajemen Satker; dan 4.) Layanan Perkantoran. Capaian kinerja organisasi Pusdiklat JPPPIW dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Capaian Kinerja Organisasi Pusdiklat JPPPIW

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renja/ RKA-KL 2019	Capaian Tahun 2019	Capaian Kinerja Organisasi
Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia					
Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah					
ASN Yang Terlatih	Jumlah ASN Yang Mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	Orang	2.970	3.045	103%
	Pelatihan Reguler	Orang	2.970	2.587	87%
	Pelatihan Kerja Sama	Orang	-	458	100%
Pengembangan Modul Pelatihan	Pola, Teknik, Kurikulum dan	Dokumen	26	22	75%
	Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan	Dokumen	4	6	150%
	Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan	Dokumen	7	8	114%
	Jumlah Dokumen Uji Coba Kurikulum dan Modul Kediklatan	Dokumen	15	8	53%
ASN Yang Terdidik	Jumlah ASN Yang Mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	Orang	105	104	99%
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	100%
	Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Layanan	1	1	100%
	Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran				
	Luas Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan				
Layanan Dukungan Manajemen Satker	Jumlah Layanan Manajemen Operasional Satuan Kerja	Layanan	1	1	100%
Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran (12 Bulan)	Layanan	1	1	100%

Sumber: Evaluasi Capaian Renstra dan Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan

Dalam pencapaian kinerja organisasi, Pusdiklat JPPPIW juga didukung oleh BUCSD JPPPIW yang mempunyai tugas melaksanakan uji coba sistem pendidikan dan pelatihan bidang jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah yang ditetapkan oleh Pusdiklat JPPPIW. Capaian kinerja organisasi BUCSD JPPPIW dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Capaian Kinerja Organisasi BUCSD JPPPIW

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renja/ RKA-KL 2019	Capaian Tahun 2019	Capaian Kinerja Organisasi
Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia					
Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah					
Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Pelatihan	Jumlah Dokumen Uji Coba Kurikulum dan Modul Pelatihan	Dokumen	8	8	100%
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	Layanan	1	1	100%
Layanan Dukungan Manajemen Satker	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Operasional Satuan Kerja	Layanan	1	1	100%
Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100%

Sumber: Laporan Kinerja BUCSD JPPPIW

4.1.2 CAPAIAN KINERJA TERHADAP RENCANA STRATEGIS 2019

Berdasarkan target-target pencapaian pada Renstra 2019 dapat disampaikan hasil capaiannya sebagaimana Tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel 4.3 Capaian Terhadap Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019		Capaian Tahun 2019	Persentase Capaian	
			Renstra	Reviu Renstra		Renstra	Reviu Renstra
Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah							
Layanan Dukungan Manajemen		Laporan	106	-	21	20%	-
	Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran	Laporan	2	-	12	600%	-
	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sarpras	Laporan	1	-	2	200%	-
	Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar	Laporan	1	-	2	200%	-
	Jumlah Laporan KAD	Laporan	1	-	2	200%	-
	Jumlah Laporan Pasca Pelatihan	Laporan	1	-	1	100%	-
	Jumlah Laporan Monev Pelatihan	Laporan	100	-	2	2%	-
ASN Yang Terlatih	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	Orang	2.850	2.850	3.045	107%	107%
Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Kediklatan		Dokumen	12	43	22	183%	51%
	Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan	Dokumen	2	3	6	300%	200%
	Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan	Dokumen	10	12	8	80%	66%
	Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan Yang Diujicobakan	Dokumen	-	28	8	-	29%
ASN Yang Terdidik	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	Orang	350	369	127	36%	34%
Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana	M ²	0	-	3.289	100%	-



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019		Capaian Tahun 2019	Persentase Capaian	
			Renstra	Reviu Renstra		Renstra	Reviu Renstra
Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	Unit	10	-	114	1.140%	-
Layanan Internal (<i>Overhead</i>)		Layanan	-	3	3	-	100%
Layanan Perkantoran		Bulan	-	12	12	-	100%

Sumber: Renstra PUPR 2015-2019 dan Permen PUPR RI Nomor 08/PRT/M/2018

1. CAPAIAN KINERJA TERHADAP SASARAN FISIK DAN KEUANGAN

Pada pelaksanaan kegiatan Pusdiklat JPPPIW tahun anggaran 2019, dengan anggaran sebesar Rp 37.644.824.000 capaian realisasi keuangan sebesar Rp 35.977.132.000 atau 95,57% sedangkan realisasi fisik sebesar 97,54%. Dengan rincian pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4 Realisasi Pusdiklat JPPPIW Berdasarkan DIPA

No	Output	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Progres	
				Keuangan (%)	Fisik (%)
1	Layanan Pendidikan	6.149.883.000	6.143.716.000	99,90	100,00
2	Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Pelatihan	5.975.366.000	5.926.119.000	99,18	100,00
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4.856.995.000	3.887.538.000	80,04	80,92
3	Layanan Dukungan Manajemen Satker	7.369.968.000	7.073.224.000	95,97	100,00
4	Layanan Perkantoran	13.292.612.000	12.946.534.000	97,40	100,00
Total		37.644.824.000	35.977.132.000	95,57	97,54

BUCSD JPPPIW pada tahun anggaran 2019, mempunyai anggaran sebesar Rp 13.483.684.000. Capaian realisasi keuangan sebesar Rp 13.034.275.000 atau 96,67% sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. Dengan rincian pada Tabel 4.5 berikut:



Tabel 4. 5 Realisasi BUCSD JPPPIW Berdasarkan DIPA

No	Output	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Progres	
				Keuangan (%)	Fisik (%)
1	Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Pelatihan	6.046.563.000	5.816.758.000	96,20	100,00
2	Layanan Internal	112.636.000	112.600.000	99,97	100,00
3	Layanan Manajemen Satker	1.146.000.000	1.022.513.000	89,22	100,00
4	Layanan Perkantoran	6.178.485.000	6.082.404.000	98,44	100,00
Total		13.483.684.000	13.034.275.000	96,67	100,00

2. CAPAIAN KINERJA TERHADAP TUGAS UTAMA

a. ASN TERDIDIK

Untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan bagi PNS Kementerian PUPR, maka BPSDM menyelenggarakan pendidikan kedinasan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri Mitra, Kementerian lain atau Lembaga Non-Kementerian baik di dalam maupun luar negeri yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum. Mengacu pada kesepakatan bersama antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Perguruan Tinggi Negeri Mitra, maka dilakukan perjanjian kerjasama antara Kepala Pusdiklat JPPPIW dengan penanggungjawab pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Mitra untuk bidang jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah. Perjanjian Kerjasama program magister berlaku paling lama 2 tahun dihitung sejak ditandatangani perjanjian kerjasama tersebut, dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Untuk pembiayaan dan waktu penyelesaian studi ASN yang mengikuti pendidikan kedinasan akan mengacu pada perjanjian kerjasama tersebut. Untuk pedoman operasional dan pembayarannya dilakukan perjanjian penyelenggaraan pendidikan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penanggungjawab pada Perguruan Tinggi Negeri Mitra. *Output* dari kegiatan tersebut adalah jumlah ASN yang terdidik yang



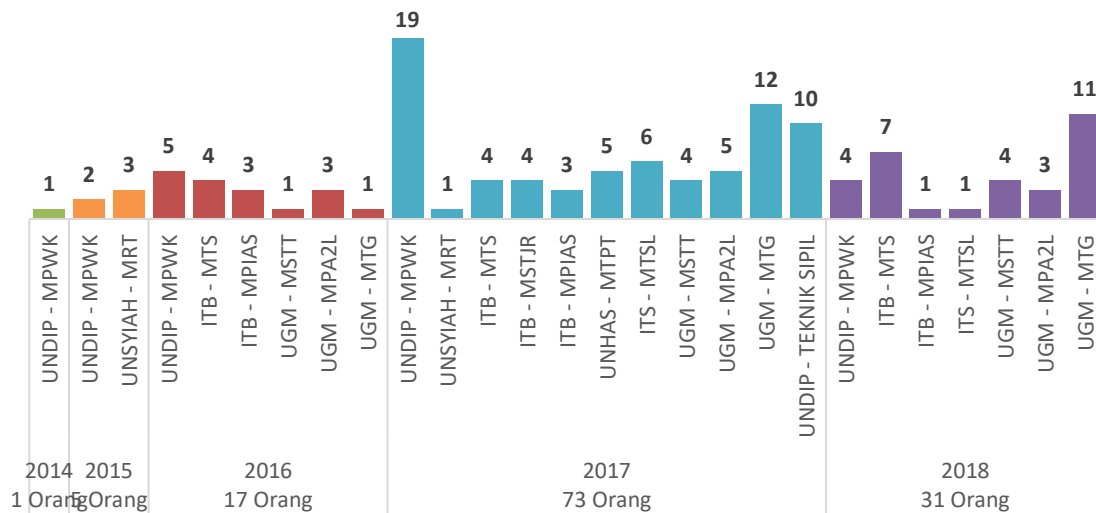
memberikan *outcome* adanya peningkatan kualifikasi ASN Kementerian PUPR sesuai dengan kebutuhan unit organisasinya.

Berdasarkan Renstra Pusdiklat JPPPIW tahun 2015-2019 bahwa target ASN yang mengikuti pendidikan di dalam negeri maupun luar negeri (karyasiswa) bidang jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan insfrastruktur wilayah pada tahun 2019 sebanyak 350 orang.

Dari rencana kerja yang tertuang dalam Renstra Pusdiklat JPPPIW, target ASN Terdidik tahun anggaran 2019 sebanyak 350 orang, realisasi ASN Terdidik sebanyak 127 orang terdiri dari:

- a) Angkatan 2014 sebanyak 1 orang;
- b) Angkatan 2015 sebanyak 5 orang;
- c) Angkatan 2016 sebanyak 17 orang;
- d) Angkatan 2017 sebanyak 73 orang; dan
- e) Angkatan 2018 sebanyak 31 orang.

Adapun rincian dari ASN Terdidik pada program kerjasama pendidikan dapat dilihat pada Grafik 4.1 berikut:

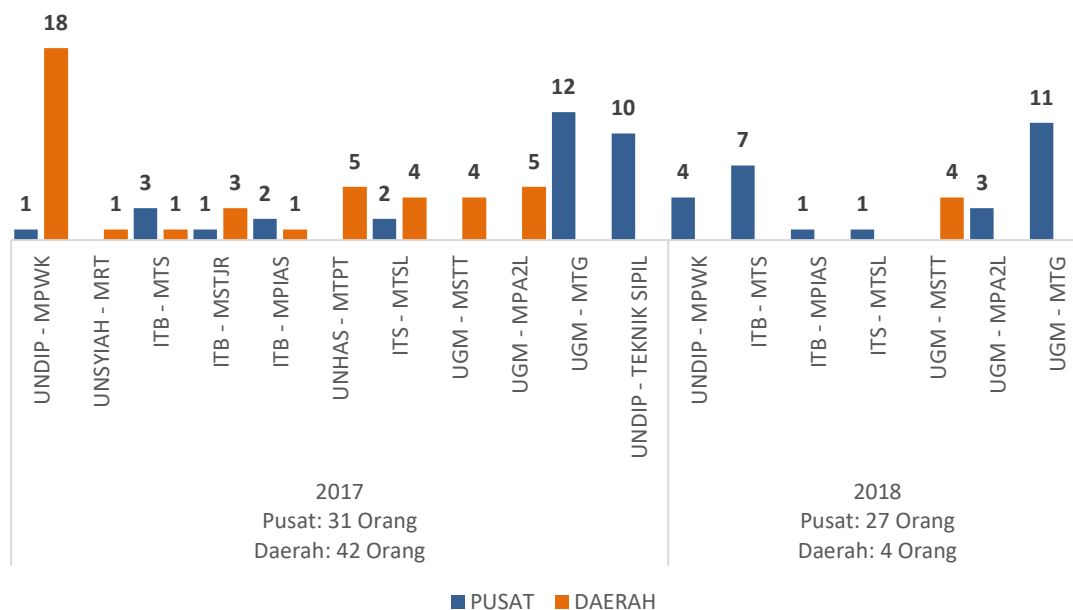


Grafik 4.1 ASN Terdidik 2019





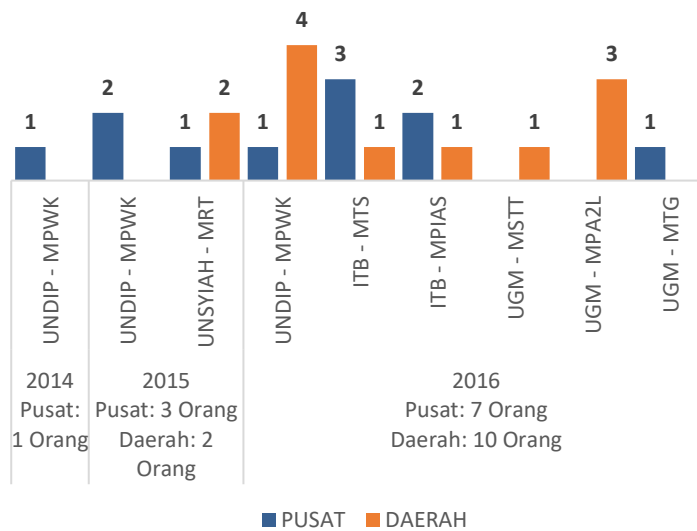
Dari 127 orang karyasiswa tersebut, karyasiswa yang masih dibiayai oleh APBN TA 2019 sebanyak 104 orang, yang terdiri dari ASN pusat sebanyak 58 orang (54%) dan ASN daerah sebanyak 46 orang (46%) dan tersebar pada Perguruan Tinggi Negeri Mitra sebagai berikut pada Grafik 4.2 di bawah:



Grafik 4.2 ASN Terdidik 2019 Yang Dibiayai APBN

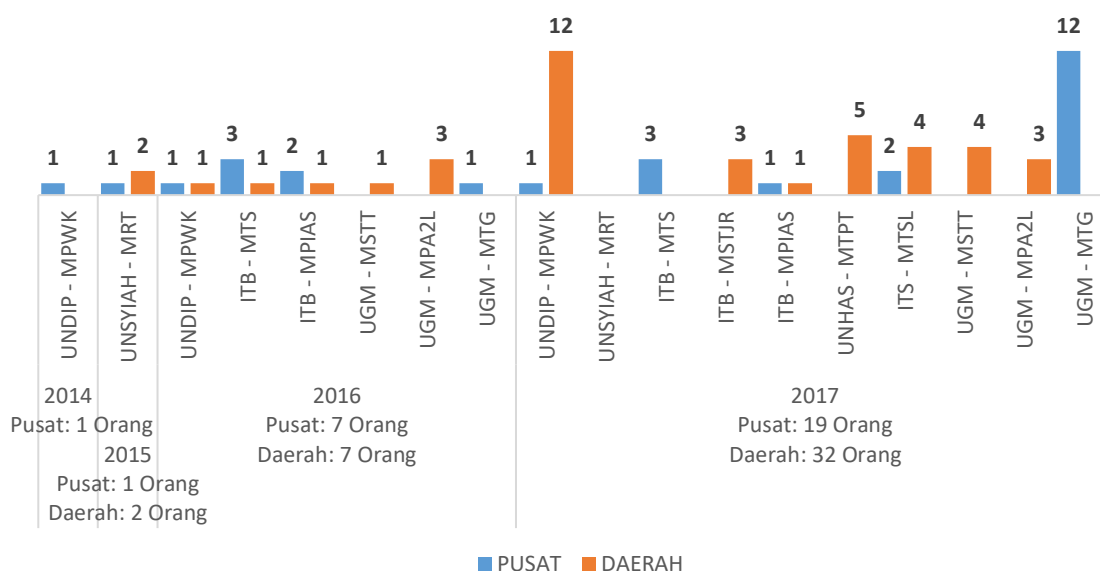
Sementara ASN yang tidak dibiayai dari APBN TA 2019 adalah karyasiswa yang melampaui masa studi selama 2 tahun, yaitu sebanyak 23 orang terdiri dari 1 orang dari angkatan tahun 2014, 5 orang dari angkatan tahun 2015, dan 17 orang dari angkatan tahun 2016 yang tersebar di 4 Perguruan Tinggi Negeri Mitra dengan rincian pada Grafik 4.3 sebagai berikut:





Grafik 4.3 ASN Terdidik 2019 Yang Tidak Dibiayai APBN

Karyasiswa yang lulus pada tahun 2019 sebanyak 69 orang yang terdiri dari 1 orang dari angkatan tahun 2014, 3 orang dari angkatan tahun 2015, 14 orang dari angkatan tahun 2016, dan 51 orang dari angkatan tahun 2017. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada Grafik 4.4 sebagai berikut:



Grafik 4.4 ASN Terdidik Yang Lulus Di Tahun 2019

b. ASN TERLATIH

Target Renstra Pusdiklat JPPPIW tahun 2019 pada indikator jumlah ASN Yang Terlatih adalah 2.850 orang. Pusdiklat JPPPIW dalam hal ini mempunyai tugas menyiapkan kebijakan teknis, penyusunan kurikulum dan modul diklat, serta menjamin ketersediaan peserta. Namun demikian, walaupun pelaksanaan diklat dilaksanakan pada Balai Diklat, peserta ASN yang mengikuti pelatihan tersebut menjadi *output* unit kerja eselon II Pusdiklat JPPPIW yang selanjutnya bersama dengan beberapa *output* unit kerja di lingkungan BPSDM dikompilasi menjadi *outcome* Unit Organisasi BPSDM. *Grand Design/Roadmap* pelatihan Pusdiklat JPPPIW masih dalam tahap penyempurnaan sehingga pelatihan yang diselenggarakan di lingkungan Pusdiklat JPPPIW masih berdasarkan dari hasil analisis kebutuhan pengembangan kompetensi yang dilakukan Pusdiklat JPPPIW bersama Widyaiswara dan Unit Organisasi terkait.

Berdasarkan kategori jenis pelatihan di Pusdiklat JPPPIW terdapat beberapa kategori, yaitu:

- a) Pelatihan Perencanaan
- b) Pelatihan Pelaksanaan
- c) Pelatihan Pengawasan
- d) Pelatihan Operasi dan Pemeliharaan
- e) Pelatihan Lainnya

Rincian dari pelatihan-pelatihan tersebut di atas, disajikan pada Tabel 4.6 dibawah ini:

Tabel 4. 6 Jumlah Angkatan Pelatihan 2019

Bidang	Kategori Pelatihan					Jumlah
	Perencanaan	Pelaksanaan	Pengawasan	Operasi dan Pemeliharaan	Lainnya	
Jalan	15	19	1	6	8	49
Perumahan	4	10	-	-	5	19
Permukiman	9	19	11	-	1	40
PIW	11	2	-	-	-	13
Jumlah	39	50	12	6	14	121



Jumlah peserta pelatihan bidang jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah tahun 2019 sebanyak 3.045 orang yang terdiri 2.345 orang peserta pusat (77%) dan 700 orang peserta daerah (23%). Berikut jumlah peserta per kategori pelatihan:

- a) Pelatihan Perencanaan sebanyak 1.044 orang
- b) Pelatihan Pelaksanaan sebanyak 1.216 orang
- c) Pelatihan Pengawasan sebanyak 338 orang
- d) Pelatihan Operasi dan Pemeliharaan sebanyak 148 orang
- e) Pelatihan Lainnya sebanyak 299 orang

Rincian dari peserta pelatihan tersebut di atas, disajikan pada Tabel 4.7 di bawah ini:

Tabel 4.7 Jumlah Peserta Pelatihan 2019

Bidang	Kategori Pelatihan										Jumlah
	Perencanaan		Pelaksanaan		Pengawasan		Operasi dan Pemeliharaan		Lainnya		
	Pusat	Daerah	Pusat	Daerah	Pusat	Daerah	Pusat	Daerah	Pusat	Daerah	
Jalan	333	102	324	138	-	20	122	26	165	6	1.236
Perumahan	80	33	140	74	-	-	-	-	109	1	437
Permukiman	172	58	362	129	318	-	-	-	18	-	1.057
PIW	165	101	37	12	-	-	-	-	-	-	315
Jumlah	750	294	863	353	318	20	122	26	292	7	3.045

c. POLA, TEKNIK, KURIKULUM DAN MODUL PELATIHAN

I. Pusediklat JPPPIW

Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Pelatihan merupakan salah satu Indikator Kinerja Penunjang (IKP) dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusediklat JPPPIW, yaitu Pendidikan dan Pelatihan. Terdapat 2 jenis dokumen, yaitu 1.) Pola dan Teknik Pelatihan dan 2.) Kurikulum dan Modul Pelatihan.

Berikut nama-nama pola dan teknik pelatihan yang telah disusun Pusediklat JPPPIW pada tahun 2019 disajikan pada tabel 4.8 di bawah ini:




Tabel 4. 8 Pola dan Teknik Pelatihan

No	Pola dan Teknik Pelatihan
1	<i>E-Learning</i> Manajemen Penyelenggaraan Jalan Dasar II
2	<i>Blended Learning</i> PISK Bidang Jalan dan Jembatan
3	<i>E-Learning</i> PISK Bidang Perumahan
4	<i>E-Learning</i> PISK Bidang Permukiman
5	Pengembangan Media Pembelajaran Pelatihan Bidang Jalan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah <ul style="list-style-type: none"> - Bahan Tayang Pelatihan PISK Reguler Bidang Jalan dan Jembatan - Bahan Tayang Pelatihan PISK <i>Blended Learning</i> Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah - Bahan Tayang Pelatihan Pengadaan Tanah untuk Pekerjaan Jalan - Video Code Intra Pelatihan Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah
6	Pengembangan Media Pembelajaran Pelatihan Bidang Perumahan dan Permukiman <ul style="list-style-type: none"> - Video <i>Teaser</i> Pelatihan Bidang Perumahan dan Permukiman - Bahan Tayang Kegiatan TA 2020 Bidang Perumahan dan Permukiman

Berikut nama-nama kurikulum dan modul pelatihan yang telah disusun Pusdiklat JPPPIW pada tahun 2019 disajikan pada tabel 4.9 di bawah ini:

Tabel 4. 9 Kurikulum dan Modul Pelatihan

No	Kurikulum dan Modul Pelatihan
A	Bidang Jalan
1	Review Kurikulum dan Modul Pelatihan Spesifikasi Umum Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan
2	Review Kurikulum dan Modul Pelatihan Preservasi Jalan
B	Bidang Perumahan
1	Review Kurikulum dan Modul Pelatihan Pengelolaan Rusunawa
2	Pengembangan Kurikulum dan Modul Pelatihan Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun
C	Bidang Permukiman



No	Kurikulum dan Modul Pelatihan
1	Pengembangan Kurikulum dan Modul Pelatihan Manajemen dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Permukiman (<i>Refresing Course</i>)
2	Pengembangan Kurikulum dan Modul Pelatihan Perencanaan Tempat Pemrosesan Akhir
D	Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah
1	Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Monitoring dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur
2	Review Kurikulum dan Modul Pelatihan Rencana Pembangunan Infrastruktur Terpadu Berbasis Pengembangan Wilayah

Berikut nama-nama pola, teknik, kurikulum dan modul pelatihan yang telah disusun BUCSD JPPPIW pada tahun 2019 disajikan pada tabel 4.10 di bawah ini:


Tabel 4. 10 Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Pelatihan BUCSD JPPPIW

No	Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Pelatihan
1	Perhitungan Kuantitas Pekerjaan jalan dan Jembatan
2	Pemeliharaan Jembatan Khusus
3	PISK Bidang Jalan dan Jembatan
4	<i>Manajemen dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Perumahan</i>
5	Pemeriksaan (<i>Quick Assessment</i>) bangunan Pasca Bencana
6	Pengelolaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
7	Penyusunan Masper Plan dan Development Plan
8	Penentuan Prioritas Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur untuk Pengembangan Wilayah

3. CAPAIAN ATAS SISTEM MANAJEMEN MUTU

Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Pusdiklat JPPPIW sedang menerapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 20/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan melaksanakan salah





satu unsur penyelenggaraan SPIP, yaitu penilaian risiko pada setiap kegiatan proses bisnis Pusdiklat JPPPIW. Serta masih mempertahankan SNI ISO 9001:2015.

4. INOVASI DAN PENGHARGAAN

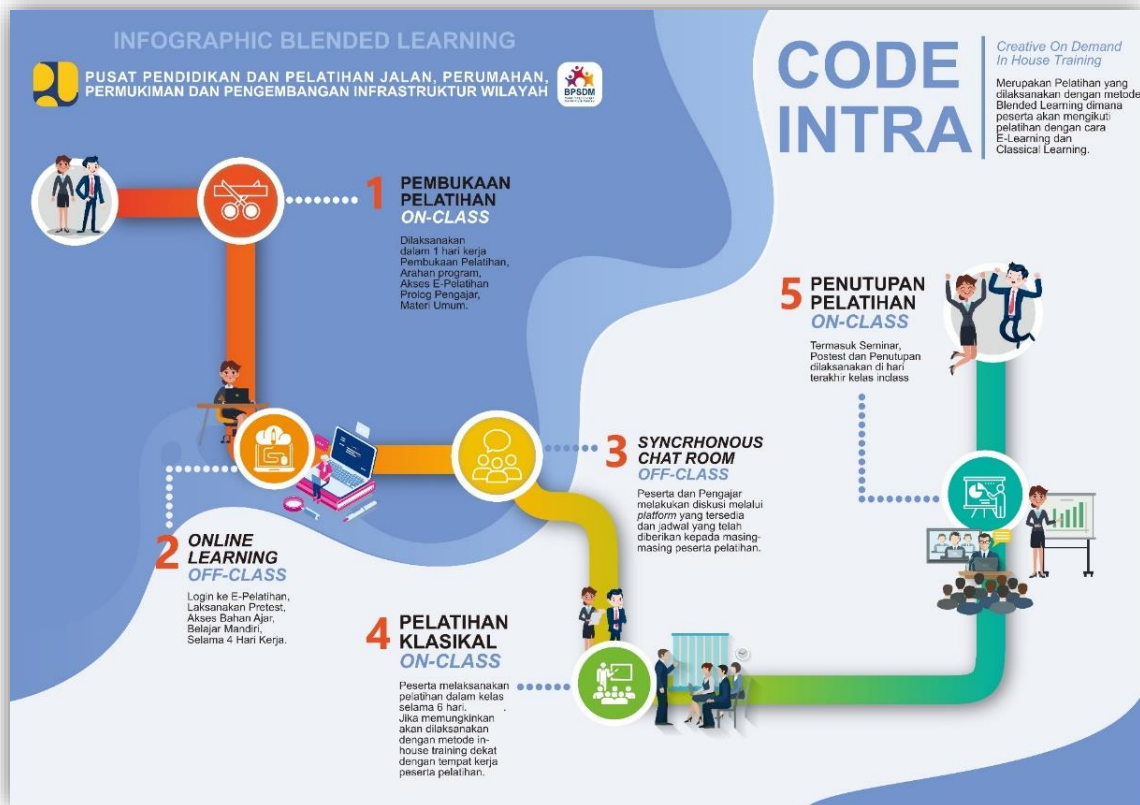
a. Code Intra

Tantangan terbesar dari pengembangan SDM yang berkualitas adalah mencapai Visium 2030. Dengan jumlah SDM yang tersedia saat ini, tujuan besar pembangunan oleh Kementerian PUPR akan membutuhkan upaya lebih dari faktor kuantitas. Dari jumlah pegawai sebanyak 23.000 orang lebih, kurang lebih hanya 40% yang memiliki latar belakang keahlian di bidang *Core Techno Business Process* yang terklasifikasikan kembali ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Penyediaan Perumahan. Jika dibandingkan antara beban kerja dan anggaran, beban kerja berlipat menjadi empat kali lebih besar daripada 10 tahun sebelumnya. Dari kendala-kendala itu, Pusdiklat JPPPIW menegaskan bahwa kualitas menjadi opsi terbaik bagi pemenuhan tuntutan kerja di bidang ini. Atas alasan yang sama, Pusdiklat JPPPIW selalu berupaya mengeluarkan inovasi-inovasi dalam pola pelatihan yang seluruhnya bermuara pada tujuan peningkatan kualitas insan PUPR.

Pemenuhan kualitas tidak mungkin dilakukan seorang diri. Pusdiklat JPPPIW perlu mengetahui apa yang dibutuhkan unit organisasi (unor) demi pengembangan SDM secara riil di dunia kerja. Oleh sebab itu, adanya komunikasi yang baik dengan unor akan berpengaruh sangat signifikan terhadap kualitas pelatihan. Terkait dengan itu, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) merasakan kendala dalam menjalankan pelatihan klasikal yang dinilai terlalu lama mengambil waktu peserta. Kendala ini lah yang kemudian menjadi sebab dari munculnya inovasi pola ajar baru sebagai solusi bersama. Pola dalam waktu efisien dengan tetap menghasilkan kualitas serupa. Salah-satu inovasi untuk menjawab permasalahan itu adalah *code intra*.

Code intra merupakan kepanjangan dari *Creative on Demand and In-house Training*. Metode belajar ini diinisiasi pertama kali oleh Pusdiklat JPPPIW. Secara umum, *code intra* dapat didefinisikan sebagai kolaborasi pola ajar klasikal dan modern. Dalam hal ini, sistem ajar menggabungkan pembelajaran *online* dan *in-house training* atau pola klasikal bertatap muka di ruang kelas. Pelaksanaan *code intra* dibagi menjadi tiga sesi,

yaitu 1.) Pembukaan pelatihan dan pembelajaran *online*; 2.) Sesi *Synchronous chat* bersama dengan pengajar; dan 3.) Sesi *In-House Training*, metode pelatihan klasikal.



Gambar 4.1 Infographic Code Intra Pusklat JPPPIW

b. BigD3

Zaman ini, digitalisasi adalah kunci. Digitalisasi adalah inti. Bahkan dalam melestarikan hal tradisional, sentuhan digital selalu menjadi sebaik-baiknya opsi. Salah satu keunggulan digitalisasi adalah kecepatan. Selain itu, sistem digital akan membuka akses selebar-lebarnya, sesuai yang kita kehendaki. Tidak terkecuali untuk hal ihwal pengarsipan. Laci-laci dokumen yang diubah bentuk menjadi digital, tentu akan berguna lebih efisien. Terutama untuk instansi yang sehari-hari bekerja di antara tumpukan dokumen.



Memahami hal itu, Pusdiklat JPPPIW memutuskan langkah besar pada 2018 lalu. Menciptakan rumah bagi dokumen-dokumen penting agar siklusnya bisa lebih mudah digulirkan oleh setiap pihak yang terlibat di wilayah kerja ini. Pusdiklat JPPPIW mulai membangun rumah yang dalam bahasa komputer lazim disebut *Document Management System*.

Document Management System atau *DMS* adalah sistem yang digunakan untuk mengelola dokumen di setiap lingkaran kehidupan dokumen yang dimaksud. *DMS* mengelola dokumen secara elektronik, mulai dari bentuk *draft*, ditinjau kembali, dipublikasi, dan disimpan.

Karena dalam tatanan kerja berada di urutan ketiga, maka Pusat 3 diambil sebagai nama lain dari Pusdiklat JPPPIW. Darisanalah muncul nama Big Data 3 atau BigD3 sebagai identitas arsip digital yang baru diresmikan bulan Januari 2018.

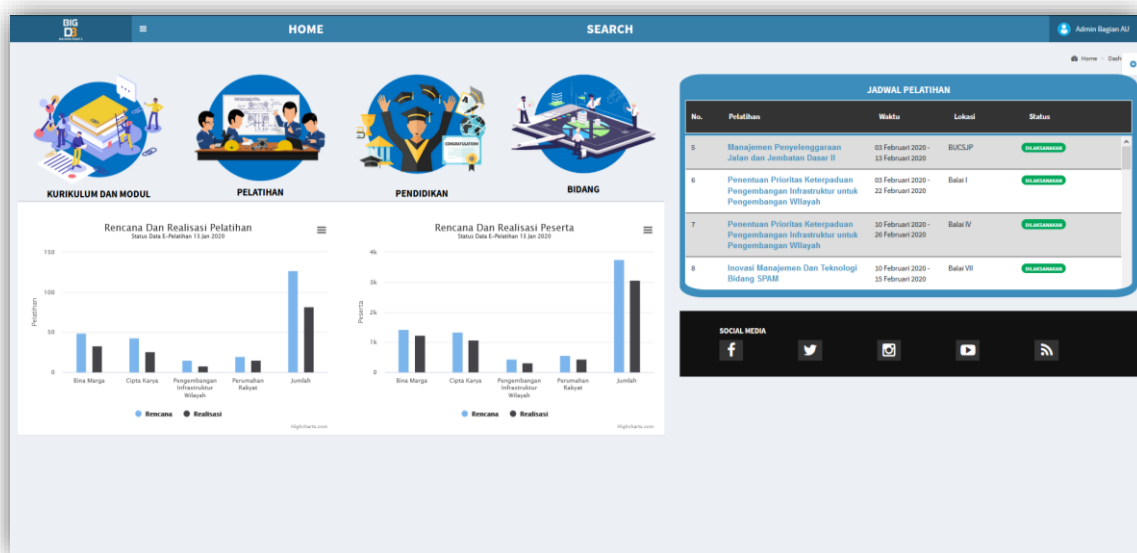
Dokumen milik Pusdiklat JPPPIW yang akan dimasukkan ke dalam BigD3 diantaranya, penyusunan kurikulum dan modul, data Widyaiswara (WI), data pegawai, data peserta pelatihan, dan laporan kegiatan, baik laporan kegiatan akhir maupun laporan kegiatan *event*. Selain itu, sistem ini juga dapat menyimpan dokumen-dokumen penting yang ada di setiap bidang dan bagian. Segala dokumen yang berhubungan dengan kegiatan Pusat 3 dan memiliki urgensi tinggi untuk digunakan kembali di masa mendatang juga menjadi prioritas data BigD3.

Keunggulan dokumentasi BigD3 terletak pada rancangan historikal berdasarkan waktu. Lalu data yang disimpan dengan format meta data untuk mempermudah pencarian, juga dapat dibuat fleksibel dan disusun sewaktu-waktu jika terdapat dokumen baru. Pengelompokan data berdasarkan unit kerja dan kegiatan menambah poin 'kemudahan' yang ditawarkan sistem ini. Apalagi, BigD3 memungkinkan pelaporan dan statistik yang komprehensif sebagai catatan untuk pengembangan sistem secara berkelanjutan.

Di masa mendatang, Pusdiklat JPPPIW tak ingin sistem menjelma statis. Pergerakan dinamis akan diupayakan dalam mode signifikan bagi perkembangan dalam sistem BigD3. Dengan kata lain, terbuka kemungkinan ruang yang lebih luas bagi dokumen,



sehingga dapat mencapai jumlah yang tak terhingga. Hal ini berkaitan erat dengan fungsi BigD3 sebagai Bank data Pusdiklat JPPPIW.



Gambar 4. 2 BigD3 (Document Management System)

c. Delivery Sistem PISK Pola Baru (Blended Learning)

Pelatihan Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) adalah salah satu pelatihan yang banyak diminati oleh pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat karena merupakan pelatihan persyaratan jabatan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu pembiayaan penyelenggaraan pelatihan yang dirasa sangat tinggi dan waktu pelaksanaan pelatihan yang dinilai terlalu lama. Berangkat dari permasalahan tersebut Pusdiklat JPPPIW mengadopsi pola pelatihan baru, yaitu *Blended Learning*, pola ini menggabungkan metode pelatihan klasikal dan non-klasikal. Pelatihan PISK dengan menggunakan pola baru ini dapat memangkas jam pelajaran yang diterima para peserta tanpa mengurangi kualitas pelatihan itu sendiri, sehingga waktu pelaksanaan pelatihan akan berkurang dan otomatis dari segi biaya penyelenggaraan pelatihan pun akan menurun. Berikut infografis pelatihan PISK pola baru (*blended learning*) bidang jalan dan jembatan pada Gambar 4.3:



Gambar 4.3 Infografis PISK Pola *Blended Learning* Bidang Jalan dan Jembatan


Selain pelatihan PISK Bidang Jalan dan Jembatan, Pusdiklat JPPPIW telah mengembangkan pola baru tersebut pada pelatihan PISK Bidang Permukiman. Berikut infografis pelatihan PISK pola baru (*blended learning*) bidang permukiman pada Gambar 4.4:



Gambar 4. 4 Infografis PISK Pola *Blended Learning* Bidang Perumahan

d. Lembaga Sertifikasi Profesi Pusdiklat JPPPIW

Merujuk pada Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) “Terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong” dan Misi PUPR Nomor 5 “Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat” serta Sasaran Strategis PUPR Nomor 11 “Meningkatnya SDM yang kompeten dan



berintegritas” dan Sasaran Program PUPR Nomor 10 “Peningkatan SDM PUPR yang kompeten”, maka Pusdiklat JPPPIW berencana mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi Pusdiklat JPPPIW (LSP JPPPIW) yang bertujuan menjamin kompetensi SDM ASN ke-PUPR-an bidang jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah melalui penerapan sistem manajemen mutu LSP sesuai dengan pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), untuk memastikan serta memelihara kompetensi SDM ASN ke-PUPR-an dalam rangka meningkatkan dan memelihara kompetensi kerja sehingga memiliki daya saing.

Dasar pembentukan LSP Pusdiklat JPPPIW, yaitu:

1. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 103/KPTS/KM/2019 tanggal 01 November 2019 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi JPPPIW.
2. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 105/KPTS/KM/2019 tanggal 01 November 2019 tentang Struktur Organisasi dan Kepengurusan LSP JPPPIW.

Visi LSP JPPPIW adalah sebagai berikut:

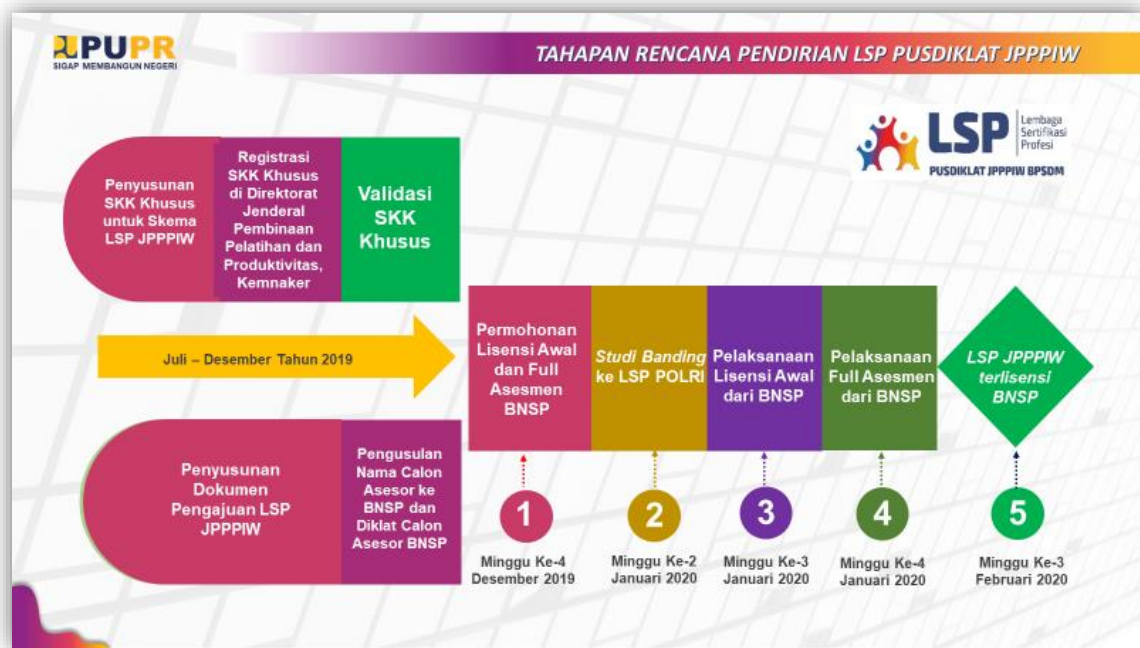
“Menjadi lembaga sertifikasi profesi yang kompeten untuk memastikan kualitas SDM ke-PUPR-an yang unggul di bidang jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah”.

Untuk mendukung visi LSP JPPPIW tersebut Pusdiklat JPPPIW telah menetapkan misi LSP JPPPIW sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi bidang jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah dengan sasaran para ASN di bidang PUPR.
2. Menetapkan kompetensi SDM melalui sertifikasi bidang jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.

- Melakukan penjaminan mutu pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan standar yang berlaku.

Berikut tahapan rencana dalam pendirian LSP JPPPIW pada Gambar 4.5:



Gambar 4.5 Tahapan Rencana Pendirian LSP JPPPIW

e. Produk Penunjang Pelatihan

Produk penunjang pelatihan lainnya meliputi:

- Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan
- Pedoman Evaluasi Pasca Pelatihan
- Katalog Kompetensi
- Katalog Profil pelatihan



Gambar 4. 6 Produk Penunjang Pelatihan

4.2 PERBANDINGAN KINERJA

Pencapaian kinerja tahun 2019 merupakan pencapaian tahun ke-5 (terakhir) dari Renstra Pusdiklat JPPPIW Tahun 2015-2019, tentunya akan memerlukan evaluasi terhadap target Renstra yang telah ditetapkan.

Sasaran kegiatan dukungan manajemen tahun 2015 sampai dengan 2019 realisasinya masih sangat kecil (17%), hal ini disebabkan adanya perbedaan yang signifikan dalam pemenuhan indikator jumlah laporan monev pelatihan, dimana target Renstra sebanyak 500 laporan (100 laporan setiap tahun) sedangkan target DIPA sebanyak ± 2 laporan setiap tahun. Target 100 laporan dalam Renstra merupakan laporan hasil



penyelenggaraan pelatihan yang disusun oleh Balai-balai Pelaksana Pelatihan di lingkungan BPSDM sedangkan target yang ditetapkan oleh Pusdiklat JPPPIW merupakan hasil pemantauan terhadap penyelenggaraan pelatihan di Balai Pelaksana Pelatihan yang dituangkan ke dalam laporan tahunan. Untuk sasaran kegiatan ASN Yang Terlatih, Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Pelatihan, Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana telah dapat memenuhi target Renstra, sedangkan pencapaian ASN Yang Terdidik tidak memenuhi target dikarenakan pada tahun 2019 Kementerian PUPR mendirikan Politeknik Pekerjaan Umum, sehingga BPSDM tidak melakukan kerjasama pendidikan vokasi lagi. Perbandingan kinerja Pusdiklat JPPPIW terhadap Renstra dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut:


Tabel 4. 11 Perbandingan Kinerja Terhadap Renstra 2015-2019

No	Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Renstra 2015-2019	Tahun					Capaian	
				2015	2016	2017	2018	2019	Total	Persen
1	Dukungan Manajemen	Laporan	527	13	16	19	18	21	87	17%
2	ASN Yang Terlatih	Orang	13.650	4.462	4.524	4.228	2.824	3.045	19.083	140%
3	Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Pelatihan	Dokumen	60	14	26	28	16	22	106	177%
4	ASN Yang Terdidik	Orang	1.700	186	298	316	220	127	1.147	67%
5	Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana	Meter ²	700	500	1.000	1.000	500	3.289	6.289	898%
6	Peralatan dan Perlengkapan	Unit	70	30	25	160	72	114	401	573%

4.3 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Pusdiklat JPPPIW pada tahun 2019 sebesar Rp 37.644.824.000 dengan target realisasi sebesar 95,59%. Pagu anggaran Pusdiklat JPPPIW ini dialokasikan untuk 6 (enam) sasaran kegiatan, yaitu: 1.) ASN Yang Terlatih; 2.) Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Pelatihan; 3.) ASN Yang Terdidik;





4.) Layanan Sarana dan Prasarana Internal; 5.) Layanan Dukungan Manajemen Satker; dan 6.) Layanan Perkantoran.

Berdasarkan jenis belanja, pagu anggaran dibagi menjadi: 1.) Belanja Pegawai (51); 2.) belanja barang (52) yang terdiri dari belanja barang operasional berupa penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dan belanja non operasional berupa dukungan manajemen, layanan pendidikan, dan penyusunan/pengembangan pola, teknik, kurikulum dan modul; dan 3.) Belanja Modal (53) yang terdiri dari belanja modal berupa pengadaan perangkat pengolah data dan peralatan fasilitas perkantoran.

Berdasarkan data realisasi anggaran Pusdiklat JPPPIW sampai dengan akhir tahun 2019 mencapai nilai sebesar Rp 35.977.132.000, yaitu 95,57%.

4.4 ANALISIS KINERJA ORGANISASI

4.4.1 METODE ANALISIS


Balanced Scorecard (BSC) mengukur kinerja organisasi berdasar empat perspektif yang berbeda namun berhubungan yang diturunkan dari visi, strategi, dan tujuan organisasi (Atkinson et al., 2012: 105). BSC merupakan usaha sistematis dalam merancang sistem pengukuran kinerja yang menerjemahkan visi, misi, dan strategi organisasi menjadi tujuan, pengukuran, dan inisiatif yang jelas. Terdapat 4 pengukuran dalam BSC, yaitu:

1. PERSPEKTIF KEUANGAN (FINANSIAL)

Pengukuran kinerja keuangan akan menunjukkan apakah perencanaan dan pelaksanaan strategi memberikan perbaikan yang mendasar bagi keuntungan perusahaan. Menurut Kaplan dan Norton (2000:23) tujuan keuangan berhubungan dengan profitabilitas yang diukur serta efisiensi pada organisasi non-profit.

2. PERSPEKTIF PELANGGAN

Perspektif pelanggan memungkinkan perusahaan untuk menyelaraskan antara kepuasan, loyalitas, retensi, akuisisi, dan probabilitas dengan pelanggan dan segmen



pasar sasaran (Kaplan dan Norton, 2000: 55). Menurut Atkinson et al. (2012: 115) perspektif pelanggan dalam pengukuran dengan BSC dapat diukur dengan kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, akuisisi pelanggan, profitabilitas dari pelanggan dan pangsa pasar. Dalam mengukur kepuasan pada organisasi non-profit dapat dilakukan dengan melihat kepuasan dari pengguna jasa.

3. PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

Perspektif proses bisnis internal diawali dengan proses inovasi menggali kebutuhan pelanggan saat ini dan yang akan datang serta mengembangkan pemecahan kebutuhan, proses operasi, penyampaian produk atau jasa pada pelanggan saat ini dan diakhiri dengan layanan purna jual (Kaplan dan Norton, 2000: 80). Dalam konteks ini analisis proses bisnis diarahkan pada optimalisasi pelayanan internal dan eksternal

4. LEARNING AND GROWTH

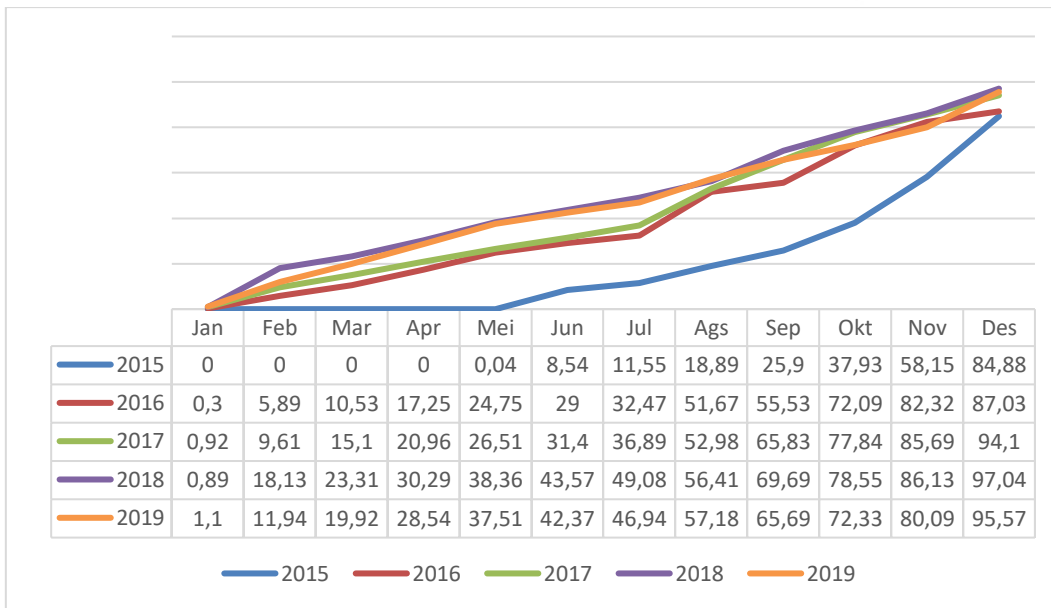
Pengertian perspektif *learning and growth*, yaitu bagaimana organisasi melakukan pengembangan pada SDM secara berkesinambungan.

Selain dari analisis di atas juga dilakukan analisis *outcome* untuk memperoleh gambaran penerapan hasil pelatihan.

4.4.2 Hasil Analisis Organisasi

1. PERSPEKTIF KEUANGAN

Merujuk pada perjanjian kinerja nomor 1, yaitu Dukungan Manajemen/Layanan Internal serta Sasaran Kegiatan Renstra No. 1: Layanan Dukungan Manajemen, dengan keluaran jumlah laporan maka aspek kinerja keuangan antara lain dapat dilihat dari serapan anggaran yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seperti pada Grafik 4.5 berikut:



Grafik 4.5 Capaian Serapan Anggaran 2015-2019

Mengacu pada grafik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa capaian serapan anggaran setiap bulan (bulan Januari hingga Desember) pada tahun 2015, 2016, 2017 sampai tahun 2018 selalu mengalami peningkatan, hanya terjadi penurunan pada tahun 2019. Capaian serapan anggaran yang paling tinggi adalah pada bulan Desember tahun 2018, yakni sebesar 97,04%.

2. PERSPEKTIF KEPUASAN PELANGGAN

Analisis kepuasan pelanggan dilakukan terhadap pelanggan eksternal dan internal. Pelanggan eksternal diarahkan pada analisis terhadap tingkat kepuasan peserta pelatihan pada materi Pelatihan yang disiapkan oleh Bidang Teknik Materi, kepuasan Widyaiswara dan kepuasan karyawan terhadap pelayanan administratif dari Pusdiklat JPPPIW. Selain itu dilakukan pula pengukuran kepuasan dari *stakeholder* kepada respon dan pelayanan Pusdiklat JPPPIW.

a. KEPUASAN PESERTA TERHADAP MATERI PELATIHAN DAN PENGAJAR

Berikut adalah gambaran kepuasan peserta terhadap materi pelatihan pada Tabel 4.12:

Tabel 4. 12 Rata-Rata Nilai Materi Pelatihan

Bidang	Evaluasi Materi Responden Menilai Materi Dengan Baik dan Sangat Baik (%)						Nilai Materi (%)
	Keterkaitan	Manfaat	Kualitas	Kemudahan	Media	Durasi	
Jalan	97,23	97,15	94,46	82,18	93,35	91,32	92,61
Perumahan	98,41	99,71	95,30	85,07	96,83	89,80	94,19
Permukiman	97,78	98,56	94,87	84,45	95,95	91,64	93,88
PIW	97,07	99,40	93,32	80,65	93,18	88,45	92,01
Rata-Rata	97,62	98,71	94,49	83,09	94,83	90,30	93,18

Sumber: Diolah dari E-Pelatihan 2019

- <70 Mendesak untuk segera dilakukan perbaikan
- 70-90 Perlu dilakukan perbaikan namun tidak mendesak
- >90 Perlu dipertahankan

Mengacu pada tabel di atas mengenai evaluasi materi yang disajikan pada kegiatan diklat dapat disimpulkan bahwa keterkaitan, manfaat, kualitas, kemudahan, media dan durasi berada pada tingkat yang tinggi atau bernilai rata-rata di atas 90% di seluruh bidangnya (jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah), secara grafik dapat dilihat pada Grafik 4.6 berikut:



Grafik 4. 6 Rekapitulasi Nilai Materi Pelatihan



Selanjutnya gambaran kepuasan peserta terhadap pengajar dapat dilihat pada Grafik 4.7 berikut:



Grafik 4.7 Rekapitulasi Nilai Widyaiswara

>= 90 = sangat puas
 70-89 = cukup puas
 60-69 = kurang puas
 <60 = tidak puas

Mengacu pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa nilai pengajar seluruh bidang, yaitu bidang jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah berada pada kategori baik dengan tingkat kepuasan cukup puas. Berikut rinciannya pada Tabel 4.13:

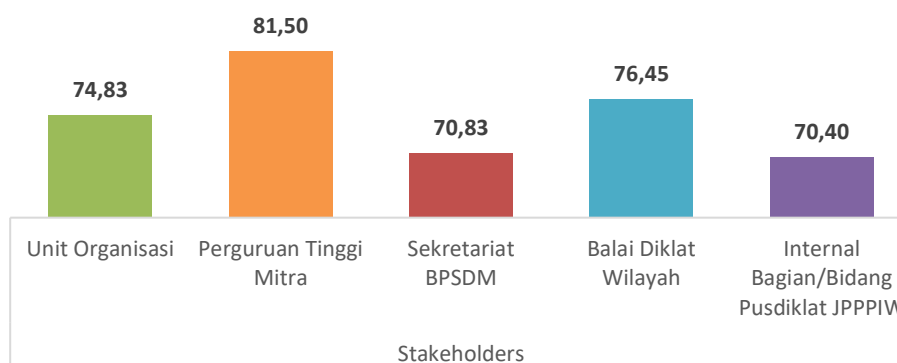
Tabel 4.13 Rata-Rata Nilai Pengajar

Bidang	Evaluasi Pengajar Responden Menilai Pengajar Dengan Baik dan Sangat Baik (%)										Nilai Pengajar (%)
	Penguasaan Materi	Ketepatan Waktu	Sistematika Penyajian	Metode	Sikap	Bahasa & Volume	Motivasi	Tujuan	Diskusi	Jawaban	
Jalan	85,50	85,30	84,98	84,62	85,51	85,28	85,47	85,02	85,43	85,28	84,80
Perumahan	84,63	84,22	84,14	83,70	84,40	84,09	84,58	84,12	84,49	84,46	83,52
Permukiman	85,02	84,52	84,34	83,93	84,81	84,58	84,54	84,40	84,67	84,24	84,07
PIW	83,17	82,40	82,29	81,86	83,04	82,81	82,54	82,35	82,72	82,30	82,10
Rata-Rata	84,58	84,11	83,94	83,53	84,44	84,19	84,28	83,97	84,33	84,07	83,62



b. KEPUASAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Dalam penyelenggaraan pelayanan, Pusdiklat JPPPIW menyediakan pelayanan bagi pemangku kepentingan eksternal maupun internal. Berdasarkan hasil analisis kepuasan pemangku kepentingan dapat dijelaskan pada Grafik 4.8 berikut:



Grafik 4.8 Kepuasan Pemangku Kepentingan Pada Pusdiklat JPPPIW

Merujuk pada grafik di atas diketahui bahwa rentang capaian kepuasan pemangku kepentingan eksternal adalah antara 70,83-81,50%, dengan kategori baik sampai dengan sangat baik. Sedangkan kepuasan layanan internal, yaitu antar bidang di lingkungan Pusdiklat JPPPIW termasuk kategori Baik, yaitu 70,40%.

3. PERSPEKTIF PROSES BISNIS

a. PENINGKATAN KUALITAS PENYEENGGARAAN KEGIATAN

Dibawah ini merupakan hasil uraian dari kegiatan Sistem Manajemen Mutu pada Tabel 4.14 sebagai berikut:

Tabel 4.14 Sistem Manajemen Mutu

No	Tahapan Pekerjaan	Status Tahapan	Waktu Tahapan	Output Tahapan
1	Review DSM dan Penyusunan DSM baru	Sudah	April – September 2019	Standar Operasional Prosedur (SOP)
2	Penyusunan Identifikasi Resiko	Sudah	Maret 2019	Daftar Identifikasi Resiko



Secara umum, dilihat dari tabel diatas kegiatan yang sudah terlaksana ada empat kegiatan, yaitu Workshop Peningkatan Pemahaman ISO 9001:2015, Penyusunan Identifikasi Resiko dan Sasaran Mutu, Penyusunan Rencana, Mutu Pelaksana, Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen Semester 1. Kegiatan yang masih *On Going* ada satu kegiatan, yaitu Review DSM dan Penyusunan DSM baru, dan ada empat kegiatan yang belum terlaksana, yaitu Sosialisasi Dokumen Sistem Mutu (DSM, Melaksanakan Audit Internal, Melaksanakan Audit Eksternal, dan Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen Semester 2.

b. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN SATKER

Dibawah ini merupakan hasil uraian dari kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Satker, yaitu penyusunan laporan kinerja pada Tabel 4.15 sebagai berikut:

Tabel 4. 15 Penyusunan Laporan Kinerja

No	Tahapan Pekerjaan	Status Tahapan	Waktu Tahapan	Output Tahapan
1	Pembahasan Metode Pengukuran Kinerja	Sudah	Februari 2019	Laporan
2	Pembahasan Penyusunan Laporan Kinerja 2019	Sudah	Desember 2019	Notulensi

Secara umum, dilihat dari tabel diatas kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sudah selesai dilaksanakan.

c. SINKRONISASI DATA RENCANA KERJA ANGGARAN

Dibawah ini merupakan hasil uraian dari kegiatan Sinkronisasi Data Rencana Kerja Anggaran pada Tabel 4.16 sebagai berikut:





Tabel 4. 16 Sinkronisasi Data Rencana Kerja Anggaran

No	Tahapan Pekerjaan	Status Tahapan	Waktu Tahapan	Output Tahapan
1	Koordinasi Penyusunan Rencana Kegiatan TA 2019	Sudah	Februari 2019	Laporan
2	Evaluasi Program Semester I	Sudah	Juli 2019	Laporan
3	Evaluasi Program Semester II	Sudah	Desember 2019	Laporan

Secara umum, dilihat dari tabel diatas kegiatan Sinkronisasi Data Rencana Kerja Anggaran telah selesai sampai tahap pelaporan.


d. PENYUSUNAN PROFIL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA PENGAJAR BIDANG JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

Penyusunan Profil Pendidikan dan Pelatihan serta Pengajar Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Dibawah ini merupakan hasil uraian dari kegiatan Penyusunan Profil Pendidikan dan Pelatihan serta Pengajar Bidang Jalan, Perumahan, Pemukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada Tabel 4.17 sebagai berikut:

Tabel 4. 17 Penyusunan Profil Pendidikan dan Pelatihan serta Pengajar Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

No	Tahapan Pekerjaan	Status Tahapan	Waktu Tahapan	Output Tahapan
1	Pengadaan Peralatan Pendukung Media Informasi dan Publikasi Pusklat JPPPIW	Sudah	Oktober – November 2019	Peralatan Pendukung Kegiatan (Kamera, Lensa Kamera, Lighting)
2	Pembuatan Poster untuk Media Publikasi	Rutin	Februari – Desember 2019	Poster





No	Tahapan Pekerjaan	Status Tahapan	Waktu Tahapan	Output Tahapan
3	Publikasi Kegiatan di Media Sosial Pusdiklat JPPPIW	Rutin	Februari – Desember 2019	Postingan di Media Sosial (Website, Facebook, Instagram, dan Twitter)
4	Pencetakan Buku Profil Pelatihan 2019 Pusdiklat JPPPIW	Rutin	Semester II	Buku Profil 2019

Secara umum, dilihat dari tabel diatas kegiatan Penyusunan Profil Pendidikan dan Pelatihan serta Pengajar Bidang Jalan, Perumahan, Pemukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah ada satu kegiatan yang sudah dilaksanakan, yaitu Pengadaan Peralatan Pendukung Media Informasi dan Publikasi Pusdiklat JPPPIW pada tanggal Oktober – November 2019 dan *output* tahapannya adalah kamera, lensa kamera, *lighting*, dll. Tiga kegiatan yang rutin dilakukan, yaitu Pembuatan Poster untuk Media Publikasi, Publikasi Kegiatan di Media Sosial Pusdiklat JPPPIW, dan Pencetakan Buku Profil Pelatihan 2019 Pusdiklat JPPPIW.

RENCANA DAN REALISASI PELATIHAN PER BIDANG

Rencana dan realiasi pelatihan per bidang dapat dilihat pada Tabel 4.18 sebagai berikut:

Tabel 4. 18 Rencana dan Realisasi Pelatihan Per Bidang

Bidang	Rencana		Realisasi		Persentase Realisasi	
	Angkatan (Akt.)	Peserta (Orang)	Angkatan (Akt.)	Peserta (Orang)	Angkatan (%)	Peserta (%)
Jalan	47	1.338	49	1.236	104,26	92,38
Perumahan	19	550	19	437	100,00	79,45
Permukiman	27	780	40	1.057	148,15	135,51
PIW	13	370	13	315	100,00	85,14
Jumlah	106	3.110	121	3.045	114,15	97,91

Sumber: E-Pelatihan Update Desember 2019



Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa persentase realisasi terbesar terdapat pada bidang permukiman dengan persentase realisasi untuk angkatan sebesar 148,15% dan persentase realisasi peserta sebesar 135,51%, dan persentase realisasi terendah pada bidang perumahan dengan persentase realisasi untuk angkatan sebesar 100,00% dan persentase realisasi peserta sebesar 79,45%. Adapun untuk informasi per Balai dapat dilihat pada Tabel 4.19 sebagai berikut:

Tabel 4. 19 Rencana dan Realisasi Pelatihan Per Balai

Bidang	Rencana		Realisasi		Persentase Realisasi	
	Angkatan (Akt.)	Peserta (Orang)	Angkatan (Akt.)	Peserta (Orang)	Angkatan (%)	Peserta (%)
BDW I Medan	17	510	18	464	105,88	90,98
BDW II Palembang	12	360	12	285	100,00	79,17
BDW III Jakarta	11	350	15	385	136,36	110,00
BDW IV Bandung	5	150	7	147	140,00	98,00
BDW V Yogyakarta	8	240	8	199	100,00	82,92
BDW VI Surabaya	13	390	15	336	115,38	86,15
BDW VII Banjarmasin	9	270	8	220	88,89	81,48
BDW VIII Makassar	11	330	12	306	109,09	92,73
BDW IX Jayapura	11	330	11	324	100,00	98,18
BUCSD JPPPIW	9	180	15	379	166,67	210,56
Jumlah	106	3.110	121	3.045	114,15	97,91

Sumber: E-Pelatihan Update Desember 2019

Secara umum hasil rencana dan realisasi pelatihan per balai, memuaskan. Hal ini terlihat dari rata-rata keseluruhan rencana dan realisasi pelatihan per balai sebesar 114,15%.

Secara keseluruhan informasi mengenai pelatihan dapat dilihat pada Tabel 4.20 dan sebagai berikut:



Tabel 4. 20 Rekapitulasi Data Capaian Pelatihan 2019

No	Bidang	Jumlah Pelatihan	Peserta						Lulus	Tidak Lulus	Belum Ada Nilai	Rata-rata Nilai Pre-test	Rata-rata Nilai Post-test	Rata-rata Nilai Akhir
			Status Instansi			Status Kepegawaian								
			Pusat	Daerah	Jumlah	PNS	Non-PNS	Jumlah						
1	Jalan	49	944	292	1.236	918	318	1.236	1.196	40	0	49,34	69,02	80,30
2	Perumahan	19	329	108	437	377	60	437	430	7	0	52,34	56,87	80,98
3	Permukiman	40	870	187	1.057	1.004	53	1.057	1.042	15	0	55,96	66,88	81,61
4	PIW	13	202	113	315	247	68	315	304	11	0	39,82	49,37	77,43
Jumlah/Rata-rata		121	2.345	700	3.045	2.546	499	3.045	1.972	73	0	49,37	61,65	80,08

Selanjutnya untuk penggunaan dan pemanfaatan barang di lingkungan Pusdiklat JPPPIW dapat dilihat pada Tabel 4.21 sebagai berikut:




Tabel 4. 21 Kartu Kendali Barang Milik Negara Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, Dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Tahun Perolehan	Lokasi	Pemanfaatan	Frekuensi Penggunaan
1	Submersible Pump	2	Baik	2019	Area Luar Kantor	Kebutuhan Untuk Suply Air Ke kantor	Setiap Hari
2	Lemari Kayu	22	Baik	2019	Bidang AU, EP, TM, Poliklinik	Penyimpanan Dokumen	Setiap Hari
3	Tabung Pemadam Api	2	Baik	2019	Koridor Lt.1 dan 2 Kantor	Perlengkapan Keamanan Kantor	Kondisional
4	CCTV – Camera Control Television System	1	Baik	2019	Area Perkantoran	Perlengkapan Keamanan Kantor	Setiap Hari
5	Mesin Absensi	1	Baik	2019	Loby. Lt.1	Penunjang Pekerjaan	Setiap Hari
6	Alat Pemotong Kertas	5	Baik	2019	Bidang AU, EP, TM	Pemotong Kertas Dokumen	Setiap Hari
7	LCD Projector/Infocus	3	Baik	2019	Aula Lt.2, Gazebo, Ruang AU	Perlengkapan Untuk Rapat	Setiap Hari
8	Acces Control System	1	Baik	2019	Pintu Masuk Aula Lt.1 dan 2	Perlengkapan Keamanan Kantor	Setiap Hari
9	Papan Gambar	3	Baik	2019	Ruang Kabid EP, TM	Penunjang Pekerjaan	Setiap Hari
10	Meja Kerja Kayu	2	Baik	2019	Ruang Poliklinik	Perlengkapan Poliklinik	Setiap Hari
11	Kursi Besi/Metal	10	Baik	2019	Ruang Poliklinik, Loby Lt.1	Penunjang Pekerjaan	Setiap Hari






No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Tahun Perolehan	Lokasi	Pemanfaatan	Frekuensi Penggunaan
12	Kursi Kayu	7	Baik	2019	Loby. Lt.1	Penunjang Pekerjaan	Setiap Hari
13	Meja Rapat	24	Baik	2019	Aula Lt.2	Perlengkapan Untuk Rapat	Setiap Hari
14	Meja Komputer	1	Baik	2019	Ruang SMM	Penunjang Pekerjaan	Setiap Hari
15	Tempat Tidur Kayu	2	Baik	2019	Rumah Dinas 1A	Kebutuhan Untuk Rumah Dinas	Setiap Hari
16	Meja Resepsionis	1	Baik	2019	Loby. Lt.1	Penunjang Pekerjaan	Setiap Hari
17	Kasur/Spring Bed	4	Baik	2019	Rumah Dinas 1A	Perlengkapan Rumah Dinas	Setiap Hari
18	A.C. Split	3	Baik	2019	Rumah Dinas 1B, Asrama	Perlengkapan Rumah Dinas	Setiap Hari
19	Kipas Angin	3	Baik	2019	Gazebo	Perlengkapan Rapat	Kondisional
20	Kompas Gas (Alat Dapur)	1	Baik	2019	Rumah Dinas 1A	Perlengkapan Dapur Kantor	Setiap Hari
21	Mixer	1	Baik	2019	Aula Lt.2	Perlengkapan Rapat	Setiap Hari
22	Loudspeaker	2	Baik	2019	Aula Lt.2	Perlengkapan Rapat	Setiap Hari
23	Sound System	1	Baik	2019	Ruang SMM	Perlengkapan Rapat	Setiap Hari
24	Microphone	20	Baik	2019	Aula Lt.2, Ruang SMM, AU	Perlengkapan Rapat	Setiap Hari
25	Dispenser	12	Baik	2019	Setiap Ruangan	Penunjang Pekerjaan	Setiap Hari
26	Mimbar/Podium	1	Baik	2019	Aula.lt. 2	Perlengkapan Ruang Rapat	Setiap Hari
27	Gordyn/Kray	1	Baik	2019	Rumah Dinas 1A	Kebutuhan Rumah Dinas	Setiap Hari
28	Microphone/Wireless MIC	2	Baik	2019	Ruang AU, Aula Lt.2	Perlengkapan Ruang Rapat	Setiap Hari
29	Power Supply Microphone	1	Baik	2019	Aula Lt.2	Perlengkapan Ruang Rapat	Setiap Hari
30	Uninterruptible Power Supply (UPS)	21	Baik	2019	Setiap Ruang Kerja	Penunjang Pekerjaan	Setiap Hari



No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Tahun Perolehan	Lokasi	Pemanfaatan	Frekuensi Penggunaan
31	Chairman/Audio Conference	1	Baik	2019	Aula Lt.2	Perlengkapan Ruang Rapat	Setiap Hari
32	Video Monitor	1	Baik	2019	Ruang. Anggaran dan Umum	Perlengkapan Kamera	Setiap Hari
33	Teleprompter	1	Baik	2019	Ruang. Anggaran dan Umum	Perlengkapan Kamera	Setiap Hari
34	Lensa Kamera	2	Baik	2019	Ruang. Anggaran dan Umum	Perlengkapan Kamera	Setiap Hari
35	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	4	Baik	2019	Asrama, Rumah Dinas 1B	Kebutuhan Rumah Dinas	Setiap Hari
36	Head Set	1	Baik	2019	Ruang. Anggaran dan Umum	Perlengkapan Kamera	Setiap Hari
37	Camera Digital	1	Baik	2019	Ruang. Anggaran dan Umum	Perlengkapan Kamera	Setiap Hari
38	Tas Kamera	1	Baik	2019	Ruang. Anggaran dan Umum	Perlengkapan Kamera	Setiap Hari
39	Lampu Blitz Kamera	1	Baik	2019	Ruang. Anggaran dan Umum	Perlengkapan Kamera	Setiap Hari
40	Monopod	1	Baik	2019	Ruang. Anggaran dan Umum	Perlengkapan Kamera	Setiap Hari
41	Clipp on	1	Baik	2019	Ruang. Anggaran dan Umum	Perlengkapan Kamera	Setiap Hari
42	Mesin Jilid	2	Baik	2019	Ruang. Anggaran dan Umum	Penjilidan Dokumen	Setiap Hari
43	Kamera Udara	1	Baik	2019	Ruang. Anggaran dan Umum	Perlengkapan Kamera	Setiap Hari






No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Tahun Perolehan	Lokasi	Pemanfaatan	Frekuensi Penggunaan
44	Alat Studio Lainnya	7	Baik	2019	Ruang. Anggaran dan Umum	Perlengkapan Kamera	Setiap Hari
45	Telephone (PABX)	1	Baik	2019	Ruang. Anggaran dan Umum	Perlengkapan Jaringan Telephone	Setiap Hari
46	Handy Talky (HT)	8	Baik	2019	Ruang. Anggaran dan Umum	Perlengkapan Keamanan	Setiap Hari
47	Conecctor	25	Baik	2019	Aula Lt.2	Perlengkapan Ruang Rapat	Setiap Hari
48	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	1	Baik	2019	R. Poliklinik	Penunjang Kesehatan	Setiap Hari
49	Tensimeter	1	Baik	2019	R. Poliklinik	Penunjang Kesehatan	Setiap Hari
50	Tabung O2	1	Baik	2019	R. Poliklinik	Penunjang Kesehatan	Setiap Hari
51	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	2	Baik	2019	R. Poliklinik	Penunjang Kesehatan	Setiap Hari
52	Examination Lamp	2	Baik	2019	R. Poliklinik	Penunjang Kesehatan	Setiap Hari
53	Examination Table	1	Baik	2019	R. Poliklinik	Penunjang Kesehatan	Setiap Hari
54	Kursi Dorong	1	Baik	2019	R. Poliklinik	Penunjang Kesehatan	Setiap Hari
55	Standar Infus	1	Baik	2019	R. Poliklinik	Penunjang Kesehatan	Setiap Hari
56	Timbangan Badan (Alat Kesehatan Umum Lain)	1	Baik	2019	R. Poliklinik	Penunjang Kesehatan	Setiap Hari
57	Alat Kesehatan Umum Lain Lainnya	4	Baik	2019	R. Poliklinik	Penunjang Kesehatan	Kondisional
58	P.C Unit	11	Baik	2019	Ruang AU, EP, TM	Penunjang Pekerjaan	Setiap Hari
59	Note Book	14	Baik	2019	Ruang AU, EP, TM	Penunjang Pekerjaan	Setiap Hari



No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Tahun Perolehan	Lokasi	Pemanfaatan	Frekuensi Penggunaan
60	Tablet PC	11	Baik	2019	Ruang AU, EP, TM	Penunjang Pekerjaan	Setiap Hari
61	Printer (Peralatan Personal Komputer)	14	Baik	2019	Ruang AU, EP, TM	Cetak Dokumen	Setiap Hari
62	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	10	Baik	2019	Ruang AU, EP, TM	Scan Dokumen	Setiap Hari
63	Access Point	6	Baik	2019	Ruang AU, EP, TM	Penunjang Pekerjaan	Setiap Hari



Secara umum barang milik negara pada Pusdiklat JPPPIW sudah dalam kondisi baik hal ini dapat terlihat pada kartu kendali barang milik negara, 63 jenis barang dengan jumlah 300 unit pada tahun 2019 dan dalam kondisi baik serta frekuensi penggunaannya rata-rata setiap hari dan ketika ada kegiatan atau kejadian tak terduga bencana kebakaran.

PENYUSUNAN MODUL

Merujuk pada Perjanjian Kinerja Nomor 2, yaitu Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Pelatihan, dengan keluaran 6 dokumen pola dan teknik pelatihan, serta 8 dokumen kurikulum dan modul pelatihan, maka capaian penyusunan Modul adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 22 Rincian Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Pelatihan

No	Kurikulum dan Modul Pelatihan	Sifat	Jenis Pekerjaan	Permasalahan	Capaian (%)
1	<i>E-Learning</i> Manajemen Penyelenggaraan Jalan Dasar II	Baru	Kontraktual	-	100
2	<i>Blended Learning</i> PISK Bidang Jalan dan Jembatan	Baru	Kontraktual	-	100
3	<i>E-Learning</i> PISK Bidang Perumahan	Baru	Kontraktual	-	100
4	<i>E-Learning</i> PISK Bidang Permukiman	Baru	Kontraktual	-	100
5	Pengembangan Media Pembelajaran Pelatihan Bidang Jalan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Review	Swakelola	-	100
6	Pengembangan Media Pembelajaran Pelatihan Bidang Perumahan dan Permukiman	Review	Swakelola	-	100
7	Review Kurikulum dan Modul Pelatihan Spesifikasi Umum Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan	Review	Swakelola	Adanya perubahan pedoman/aturan saat proses penyusunan	100
8	Review Kurikulum dan Modul Pelatihan Preservasi Jalan	Review	Swakelola	-	100
9	Review Kurikulum dan Modul Pelatihan Pengelolaan Rusunawa	Review	Swakelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesulitan dalam menentukan waktu pelaksanaan kegiatan rapat (Lokakarya) mengingat padatnya jadwal para narasumber undangan 2. Mundurnya pelaksanaan kegiatan Lokakarya menyebabkan waktu yang tersedia untuk finalisasi draft output kegiatan menjadi lebih pendek 3. Padatnya jadwal KI Substansi menyebabkan output kegiatan belum/tidak terselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan 	100
10	Pengembangan Kurikulum dan Modul Pelatihan Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun	Review	Swakelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Padatnya jadwal KI Substansi menyebabkan output kegiatan belum terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan 2. Sulitnya koordinasi dengan 2 KI Substansi, sehingga waktu penyelesaian output antara satu KI dan KI lainnya berbeda 	100

No	Kurikulum dan Modul Pelatihan	Sifat	Jenis Pekerjaan	Permasalahan	Capaian (%)
				<ul style="list-style-type: none"> 3. Kesulitan dalam menentukan waktu pelaksanaan kegiatan rapat (khususnya Lokakarya) mengingat padatnya jadwal para narasumber undangan 4. Pelaksanaan kegiatan Lokakarya yang dilaksanakan bulan Desember menyebabkan waktu yang tersedia untuk finalisasi draft output kegiatan menjadi lebih pendek 	
11	Pengembangan Kurikulum dan Modul Pelatihan Manajemen dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Permukiman (<i>Refresing Course</i>)	Review	Swakelola	-	100
12	Pengembangan Kurikulum dan Modul Pelatihan Perencanaan Tempat Pemrosesan Akhir	Review	Swakelola	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mundurnya pelaksanaan kegiatan Lokakarya menyebabkan waktu yang tersedia untuk finalisasi draft output kegiatan menjadi lebih pendek 2. Adanya penyesuaian materi (perubahan dari Lokakarya) di salah satu modul yang membutuhkan waktu lebih 3. Padatnya jadwal KI Substansi menyebabkan output kegiatan belum/tidak terselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan 	100
13	Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Monitoring dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur	Baru	Kontraktual	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kesulitan mencapai kesepakatan dalam penyamaan konsepsi dan fokus substansi yang akan dibahas antara konsultan dan narasumber 2. Penyesuaian waktu kegiatan dengan kesibukan narasumber (WI dan Unor) 3. Waktu pelaksanaan terlalu singkat 	100
14	Review Kurikulum dan Modul Pelatihan Rencana Pembangunan Infrastruktur Terpadu Berbasis Pengembangan Wilayah	Review	Swakelola	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dibutuhkan tenaga ahli substansi/akademisi untuk menyusun materi dan menjamin kesesuaian substansi dengan kebutuhan unit organisasi 2. Efektifitas waktu pertemuan/rapat pembahasan 3. Penyesuaian waktu kegiatan dengan kesibukan narasumber (WI dan Unor) 	100



CAPAIAN PELAYANAN KARYASISWA

Selanjutnya capaian pelayanan terhadap karyasiswa diuraikan pada Tabel 4.23 berikut:



Tabel 4. 23 Rekapitulasi Jumlah Karyasiswa Menurut Program Studi dan Angkatan Program Studi

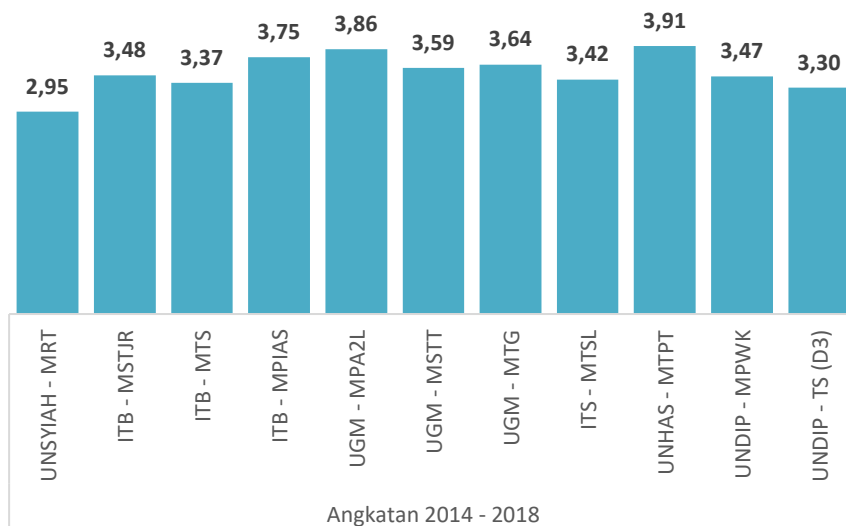
No	Program Studi	Angkatan															Total 2014-2018		
		2014			2015			2016			2017			2018			T	L	BL
		T	L	BL	T	L	BL	T	L	BL	T	L	BL	T	L	BL			
1	UNSYIAH – MRT	19	19	-	10	10	-	4	4	-	1	-	1	-	-	-	34	33	1
2	ITB – MSTJR	15	15	-	17	17	-	6	6	-	4	3	1	-	-	-	42	41	1
3	ITB – MTS	12	11	1*	5	5	-	9	9	-	4	3	1	7	-	7	37	28	9*
4	ITB – MPIAS	11	11	-	11	11	-	5	5	-	3	2	1	1	-	1	31	29	2
5	UGM – MPA2L	-	-	-	9	9	-	9	9	-	5	3	2	3	-	3	26	21	5
6	UGM – MSTT	16	16	-	15	15	-	14	14	-	4	4	-	4	-	4	53	49	4
7	UGM – MTG	-	-	-	-	-	-	5	5	-	12	12	-	11	-	11	28	17	11
8	ITS – MTSL	-	-	-	15	15	-	4	4	-	6	6	-	1	-	1	26	25	1
9	UNHAS – MTPT	-	-	-	20	20	-	15	15	-	5	5	-	-	-	-	40	40	-
10	UNDIP – MPWK	16	16	-	24	21	3*	18	15	3	19	13	6	4	-	4	81	65	16*
11	UNDIP – TS (D3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10	-	-	-	10	-	10
Total		89	88	1	126	123	3	89	86	3	73	51	22	31	-	31	408	348	60

Keterangan:
T: Terdaftar
L: Lulus
BL: Belum Lulus
*: Termasuk *Drop Out*



Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah karyasiswa *on-going* (termasuk *drop out*) pendidikan kedinasan Kementerian PUPR di bidang jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah sampai bulan Desember tahun 2019 adalah 60 orang karyasiswa, 17 orang (termasuk *drop out*) diantaranya sudah melewati batas waktu pendidikan (2 tahun), yaitu terdapat pada program studi MRT UNSYIAH, MSTJR ITB, MTS ITB, MPIAS ITB, MPWK UNDIP, dan MPA2L UGM.

Merujuk pada hasil Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) karyasiswa *on-going* dari angkatan 2014-2018 di setiap program studi memiliki rata-rata IPK 3,52. Hal tersebut merupakan salah satu parameter perkembangan yang sangat memuaskan dari penyelenggaraan pendidikan kedinasan. Grafik 4.9 di bawah ini memberikan informasi mengenai perbandingan rata-rata IPK dari karyasiswa di masing-masing program studi selama rentang waktu antara tahun 2014-2019.



Grafik 4.9 Perbandingan Rata-Rata IPK Karyasiswa

Berdasarkan Gambar di atas dapat diketahui bahwa IPK rata-rata berada di atas 3,00 dan hanya program studi MRT UNSYIAH yang berada di bawah 3,00 serta terdapat pula yang masuk pada golongan cum laude di atas 3,60. Hal tersebut menunjukkan distribusi capaian IPK ada pada kategori memuaskan sampai dengan cum laude.





4. PERSPEKTIF *LEARNING AND GROWTH*

Dalam rangka mendukung optimalisasi kinerja organisasi dilakukan pula upaya pengembangan dan pembelajaran di lingkungan internal. Kegiatan yang dimaksud adalah pemeliharaan kesehatan pegawai, pelatihan bagi pegawai, dan kegiatan yang diarahkan pada semangat kerja pegawai.

Pembelajaran organisasi antara lain ditandai dengan proses pengembangan SDM pengelola organisasi yang dilakukan secara terus menerus. Dalam konteks pembelajaran dan pengembangan organisasi, SDM Pusdiklat JPPPIW pada tahun 2019 telah ikut serta pada beberapa kegiatan program pelatihan sebagai berikut:

Tabel 4. 24 ASN Pusklat JPPPIW Yang Mengikuti Program Pengembangan Tahun 2019

No.	Nama	Jabatan	NIP/NIK	Nama Pelatihan	Tempat dan Waktu Diklat
1	Ir. Thomas Setiabudi Aden, M.Sc.Eng.	Kapus JPPPIW	196405201989031020	Certified Professional Human Resources Management (CPHRM)	Hotel Amaris Codefin Kemang 14 Juni 2019
				Profesional Coaching Certificate Program (PCCP)	Gran Mahakam Hotel 3 – 5 Juli 2019
				Pelatihan Keuangan untuk Non-Pengelola Keuangan (Finon)	Ambhara Hotel 15 – 16 Juli 2019
				Pelatihan Sertifikasi Manajer SDM	PPM Manajemen 14 Agustus 2019
2	Asep Wardiman, S.H., M.Pd.	Kabag Anggaran dan Umum	196112231992031001	Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	LKPP 24 Juni – 28 Juni 2019
3	Ero, M.Pd.	Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan	197303282002121002	Pelatihan Sertifikasi Manajer SDM	PPM Manajemen 12 – 15 November 2019 Balai Diklat PUPR Wil. III Jakarta 23 November 2019
				Diklat Kepemimpinan II	ASN Corporate University Jl. Administrasi II, Pejompongan, Jakarta Pusat 18 – 20 November 2019
4	Dra. Sri Musri Ambarukmi, M.T.	Kepala Bidang Teknik dan Materi Perumahan dan Permukiman	196602101994032001	Pelatihan Sertifikasi Manajer SDM	PPM Manajemen 12 – 15 November 2019 Balai Diklat PUPR Wil. III Jakarta 23 November 2019
5	Dra. Nyimas Nina Indrasari, M.Sc.	Jafung Teknik Penyehatan Lingkungan	196008291990032001	Pelatihan Pengembangan Kapasitas Fasilitator	Hotel Acacia 07 – 09 Oktober 2019



No.	Nama	Jabatan	NIP/NIK	Nama Pelatihan	Tempat dan Waktu Diklat
6	Desy Sagitha Nurwathy, S.Sos.	Kepala Subbagian Program dan Evaluasi	197912092008012010	Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV	Balai Diklat PUPR Wil. IV Bandung 11 Februari – 24 Mei 2019
				Pelatihan Sertifikasi Manajer SDM	PPM Manajemen 19 – 22 November 2019 Balai Diklat PUPR Wil. III Jakarta 30 November 2019
7	Heri Rusyana, S.ST.	Kasubbag Umum	196406071993031000	Pelatihan <i>Digital Policy 4.0 Batch II</i> (Manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pemerintahan)	BPPTIK Kemenkominfo Cikarang 29 – 31 Juli 2019
8	Rahayu Sri Nurhayati, S.Sos., M.M.	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan I	197102032008122001	Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV	Balai Diklat PUPR Wil. IV Bandung 11 Februari – 24 Mei 2019
				Profesional Coaching Certificate Program (PCCP)	Gran Mahakam Hotel 16 – 18 Oktober 2019
				Pelatihan Sertifikasi Manajer SDM	PPM Manajemen 19 – 22 November 2019 Balai Diklat PUPR Wil. III Jakarta 30 November 2019
9	Kiki Andriana Palupi, S.T., M.T.	Kepala Subbidang Teknik dan Materi Pelatihan Bidang Jalan dan Jembatan	198404142009122000	Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV	Balai Diklat PUPR Wil. VI Surabaya 11 Maret – 5 Juli 2019
				Pelatihan Sertifikasi Manajer SDM	PPM Manajemen 19 – 22 November 2019 Balai Diklat PUPR Wil. III Jakarta 30 November 2019





No.	Nama	Jabatan	NIP/NIK	Nama Pelatihan	Tempat dan Waktu Diklat
10	Nur Aini Zakiyah, S.T., M.T.	Kepala Subbidang Teknik dan Materi Pelatihan Bidang PIW	198208112009122001	Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV	Balai Diklat PUPR Wil. IV Bandung 11 Februari – 24 Mei 2019
				Pelatihan Sertifikasi Manajer SDM	PPM Manajemen 19 – 22 November 2019 Balai Diklat PUPR Wil. III Jakarta 30 November 2019
11	Nur Fajri Arifiani, S.T., M.T., M.Eng.	Kepala Subbidang Teknik dan Materi Pelatihan Bidang Perumahan	198401252008012005	Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV	Balai Diklat PUPR Wil. IV Bandung 11 Februari – 24 Mei 2019
				Pelatihan Sertifikasi Manajer SDM	PPM Manajemen 12 – 15 November 2019 Balai Diklat PUPR Wil. III Jakarta 23 November 2019
12	Fajeri Adi Putera Lubis, S.IP., M.T.	Kepala Subbidang Teknik dan Materi Pelatihan Bidang Permukiman	198508302010121005	Pelatihan Sertifikasi Manajer SDM	PPM Manajemen 19 – 22 November 2019 Balai Diklat PUPR Wil. III Jakarta 30 November 2019
13	Heriswan Tom Ronitan, S.E., M.M.	Penelaah Kepegawaian	197205121997031000	Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	LKPP 24 – 28 Juni 2019
14	Ahmad Fandi, S.ST.	Penelaah Keuangan	198703222010121002	Pelatihan Pelaksanaan Anggaran	Balai Diklat PUPR Wil. VI Surabaya 26 – 30 Maret 2019
15	Dila Nindita, A.Md.	Penelaah Keuangan	198809142015032004	Pelatihan Keprotokolan	Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara 19 – 22 Agustus 2019






No.	Nama	Jabatan	NIP/NIK	Nama Pelatihan	Tempat dan Waktu Diklat
16	Yoyon Sopian Saori	Penelaah Keuangan	197308182014101001	Pelatihan Pelaksanaan Anggaran	Balai Diklat PUPR Wil. VI Surabaya 18 – 22 Februari 2019
				Pelatihan Training Officer Course (TOC)	Balai Diklat PUPR Wil. VIII Makassar 22 – 25 April 2019
				Pelatihan Bendahara Pengeluaran	Balai Diklat PUPR Wil. V Yogyakarta 21 – 25 Oktober 2019
17	Debi Ari Saputra	Penelaah BMN	19840215 2014101001	Pelatihan BMN	Balai Diklat PUPR Wil. II Palembang 10 – 13 April 2019
18	Christianto Youstra Valentino Tarigan, S.E.	Penyusun Monev dan Pelaporan	199112312019031010	Bela Negara, Pelatihan Dasar CPNS dan Pengenalan Kelitbangan	Pusdiklat Bela Negara Kemhan RI 21 Juli - 2 Agustus 2019
					Balai Diklat PUPR Wil. III Jakarta dan Balai Penilaian Kompetensi 15 – 16 Oktober 2019
					Balai Diklat PUPR Wil. IV Bandung 21 Oktober – 25 November 2019
19	Essa Ella Lusya, S.Ag. M.Si.	Analisis Teknik dan Materi	196902202007012000	Pelatihan Training Officer Course (TOC)	Balai Diklat PUPR Wil. VIII Makassar 22 – 25 April 2019
20	Gina Nawangwulan, S.T., M.T.	Analisis Teknik dan Materi	197607272009032006	Pelatihan Pengelolaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Balai Diklat PUPR Wil. IX Jayapura 19 – 24 Agustus 2019
				Pelatihan SMK3 Konstruksi Ahli Madya	Mason Pine Hotel Jl. Parahyangan KM. 1,8, Padalarang 17 – 19 Desember 2019





No.	Nama	Jabatan	NIP/NIK	Nama Pelatihan	Tempat dan Waktu Diklat
21	Sri Handayani, S.E.	Sekretaris	3315076803950003	Pelatihan Teknis Tata Persuratan dan Kearsipan	Balai Diklat PUPR Wil. VII Banjarmasin 08 – 11 April 2019





Kesehatan pegawai yang menurun pada beberapa bulan terakhir menuai ide pelayanan kesehatan untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan (*medical check-up*). Kegiatan *medical check-up* ini bekerja sama dengan Biro Umum – Sekretariat Jenderal – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diikuti oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, dan Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung.

Adapun kegiatan pengembangan SDM lain yang diikuti adalah Seminar dan Lokakarya baik di dalam negeri maupun di Luar Negeri. Pada bulan November Pusdiklat JPPPIW mengadakan Lokakarya Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional dan Pengajar Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang diikuti oleh para Widyaiswara, Jafung Pengajar, dan Pegawai Pusdiklat JPPPIW. Sedangkan pada bulan Desember Sosialisasi Jabatan Fungsional diikuti oleh seluruh PNS di lingkungan Pusdiklat JPPPIW.

Berbagai kegiatan pengembangan SDM yang juga dilaksanakan secara rutin adalah olah raga pada setiap hari Jumat, berpartisipasi pada turnamen olah raga pada Hari Bakti Pekerjaan Umum yang jatuh pada tanggal 3 Desember. Selanjutnya kegiatan kerohanian juga diselenggarakan secara rutin di lingkungan Pusdiklat JPPPIW.

4.4.3 ANALISIS OUTCOME

1. EVALUASI PASCA PELATIHAN


Tujuan dari evaluasi pasca pelatihan adalah untuk mengetahui efektifitas pelatihan ditinjau dari tingkat implementasi di tempat kerja dan kontribusinya bagi pencapaian kinerja organisasi. Sasaran dari evaluasi pasca pelatihan adalah memperoleh data tentang implementasi hasil pelatihan di tempat kerja berdasarkan informasi dari alumni pelatihan, atasan langsung, rekan sejawat, dan unit pengguna. Keluaran evaluasi pasca pelatihan, yaitu 1.) Informasi tingkat penerapan materi hasil pelatihan di tempat kerja; 2.) Informasi manfaat hasil pelatihan terhadap kinerja individu, kinerja unit organisasi dan

masyarakat; dan 3.) Rekomendasi untuk peningkatan kinerja pelatihan dari sisi kebermanfaatan pelatihan.

Adapun hasil evaluasi pasca pelatihan dapat dilihat pada Tabel 4.25 berikut:

Tabel 4. 25 Hasil Evaluasi Pasca Pelatihan

No	Bidang	Nama Pelatihan	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Dukungan Organisasi
1	Jalan	Padat Karya dalam Preservasi Jalan dengan Skema <i>Long Segment</i>	79,20	82,99	85,74	74,58	73,23
2	Jalan	Pemeriksaan Jembatan	77,86	81,30	86,22	73,33	71,43
3	Jalan	Pelaksanaan <i>Rigid Pavement</i>	82,01	81,41	86,37	80,42	81,67
4	Jalan	Spesifikasi Umum Pekerjaan Jalan dan Jembatan	84,36	75,85	87,87	79,49	84,64
5	Jalan	Penyusunan RAB Pekerjaan Jalan dan Jembatan	80,05	78,46	92,68	85,93	87,30
6	Jalan	Pelaksanaan Drainase Jalan	80,18	81,17	81,34	72,42	68,52
7	Jalan	Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan (Sertifikasi LPJKN - HPJI) Ahli Muda	74,99	81,42	79,79	78,00	75,56
8	Jalan	Penjamin Mutu Beton pada Pelaksanaan Konstruksi Jalan dan Jembatan TK. Terampil	82,41	82,82	85,52	76,67	80,95
9	Jalan	Perhitungan Kuantitas dalam Pelaksanaan Pekerjaan Jalan dan Jembatan	80,02	81,71	91,61	82,00	88,89
10	Jalan	Perencanaan Jalan Berkeselamatan (Bersertifikasi HPJI) Ahli Muda Keselamatan Jalan	80,81	84,65	88,95	81,19	86,51
11	Perumahan	Penyediaan Perumahan	76,32	78,35	86,01	76,67	75,21
12	Perumahan	PISK Bidang Perumahan	80,22	82,01	90,79	83,33	87,04
13	Perumahan	Pembangunan Perumahan Tapak Layak Huni	81,17	81,21	81,68	70,00	70,63
14	Permukiman	Perencanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	81,81	82,09	85,81	83,33	80,81
15	Permukiman	Pengembangan Permukiman dan Perkotaan	75,20	84,12	85,30	78,33	72,22
16	Permukiman	Perencanaan Teknis Terinci DED SPAM	80,28	80,33	87,42	76,67	73,23
17	Permukiman	Pengelolaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara	80,71	80,28	84,94	73,57	76,47



No	Bidang	Nama Pelatihan	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Dukungan Organisasi
18	Permukiman	Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Sanitasi Perdesaan Padat Karya	78,89	82,49	85,80	78,97	85,62
19	Permukiman	Inovasi Manajemen dan Teknologi Bidang SPAM	80,07	82,72	88,74	77,92	78,89
20	PIW	Penyusunan <i>Master Plan</i> dan <i>Development Plan</i>	79,18	79,00	83,95	81,82	73,50
Rata-Rata			79,79	81,22	86,33	78,23	78,62

Ket:

Level 1: Pemahaman Terhadap Materi Pelatihan

Level 2: Hasil Nilai Pelatihan


Level 3: Pemanfaatan Hasil Pelatihan di Tempat Kerja

Level 4: Manfaat Hasil Pelatihan Yang Dirasakan Oleh Pengguna Eksternal

Berdasarkan Tabel di atas secara keseluruhan manfaat pelatihan yang dirasakan oleh alumni di tempat kerja maupun oleh pengguna eksternal semua berada pada skor >75% atau termasuk kategori Baik. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pelatihan dapat diimplementasikan di tempat kerja dan dinilai baik oleh pengguna eksternal.

2. INDEKS *OUTCOME* PUSDIKLAT JPPPIW

Dalam mencapai target pencapaian Renstra BPSDM dan Renstra Pusdiklat JPPPIW periode tahun 2015-2019, terdapat 2 indikator kinerja utama yang terkait secara langsung dengan SDM PUPR, yaitu “ASN Terlatih” dan “ASN Terdidik”. ASN Terlatih yang dimaksud disini adalah SDM PUPR (PNS Pusat maupun Daerah yang bekerja di bidang PUPR) yang menjalani diklat atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya. Target kinerja ASN Terlatih Pusdiklat JPPPIW berarti adalah para ASN PUPR yang telah lulus dan menjalani pelatihan di bidang jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah. Sedangkan ASN Terdidik yang dimaksud disini adalah SDM PUPR (PNS Pusat maupun Daerah yang bekerja di bidang PUPR) yang menjalani pendidikan kedinasan untuk meningkatkan kompetensinya. Target kinerja ASN Terdidik Pusdiklat JPPPIW berarti adalah para ASN PUPR yang telah lulus dan menjalani pendidikan magister yang merupakan bagian dari program pendidikan kedinasan, kerjasama Pusdiklat JPPPIW BPSDM dengan beberapa Perguruan Tinggi Mitra yang relevan dengan bina marga, perumahan, cipta karya dan pengembangan infrastruktur wilayah.



Dalam perhitungan capaian Renstra, Pusdiklat JPPPIW memerlukan perhitungan yang menjembatani antara capaian *outcome* Renstra BPSDM dengan capaian *output* Pusdiklat JPPPIW. Perhitungan tersebut melingkupi rasio antara dua unsur dari kegiatan utama Pusdiklat JPPPIW, yaitu pendidikan dan pelatihan. Dari hal tersebut, maka terbitlah indeks *outcome* Pusdiklat JPPPIW.

Prinsip penyusunan Indeks *Outcome* adalah:

- a. Hasilnya mewakili kinerja organisasi pada tingkat hasil (*outcome*)
- b. Indeks sensitif atau mempertimbangkan perubahan kualitas (tidak hanya kuantitas)
- c. Proses perhitungan sederhana dan dapat dioperasikan dengan lancar oleh Pusdiklat JPPPIW, Pusdiklat SDA dan Konstruksi dan Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional.

Langkah dalam penyusunan Indeks *Outcome* adalah:

- a. Menghitung Indeks Pelatihan
 - a) Menyusun tabel distribusi frekuensi relatif (%)
 - b) Menentukan nilai tengah tiap frekuensi
 - c) Menyusun nilai kontinu (0-100)
 - d) Nilai kontinu dinyatakan sebagai Indeks *Outcome* Pelatihan
- b. Menghitung Indeks Pendidikan, rata-rata IPK nilai kontinyu (1-4) standar 3
- c. Menyusun Indeks *Outcome* Tunggal (gabungan indeks Pendidikan dan pelatihan)
 - a) Menghitung bobot relatif peserta pendidikan dan pelatihan
 - b) Menjumlahkan secara tertimbang, sehingga diperoleh hasil

Penilaian indeks *outcome* Pusdiklat JPPPIW terdiri dari 2 aspek, yaitu pelatihan (ASN Terlatih) dan pendidikan kedinasan (ASN Terdidik) dan menggunakan pendekatan nilai kelulusan peserta pelatihan dengan kategori “Baik Sekali”, “Memuaskan” dan “Sangat Memuaskan” serta IPK rata-rata karyawan pendidikan kedinasan.



Rumus perhitungan Indeks *Outcome* Pusdiklat JPPPIW adalah sebagai berikut:

Indeks *Outcome* Total Pusdiklat JPPPIW =

(Bobot Pelatihan x Indeks Pelatihan) + (Bobot Pendidikan x Indeks Pendidikan)

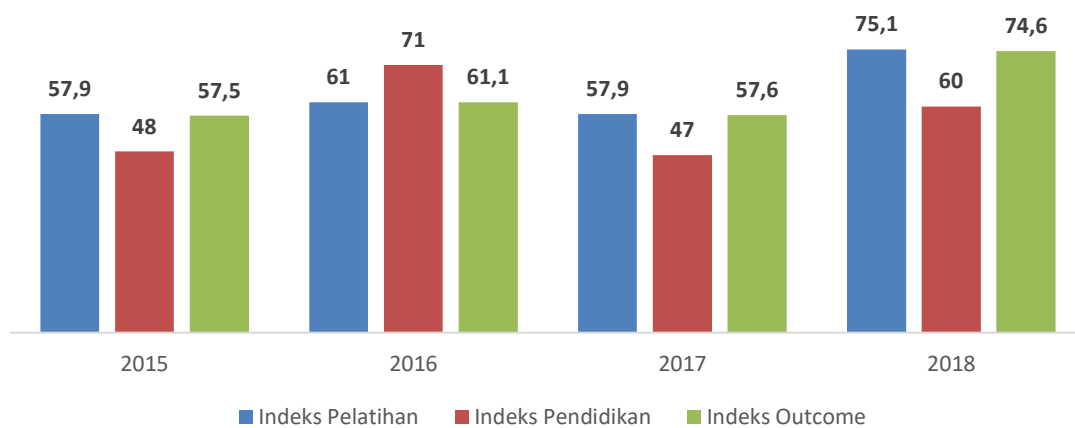
Rumus dan perhitungan dari bobot pelatihan dan pendidikan adalah sebagai berikut.

$$\text{Bobot Pelatihan Tahun } N = \frac{\text{Jumlah ASN Terlatih di Tahun } N}{\text{Jumlah ASN Terlatih dan ASN Terdidik di Tahun } N}$$

$$\text{Bobot Pendidikan Tahun } N = \frac{\text{Jumlah ASN Terdidik di Tahun } N}{\text{Jumlah ASN Terlatih dan ASN Terdidik di Tahun } N}$$

Dengan rumus-rumus perhitungan diatas (perhitungan secara rinci ada pada Lampiran), maka diperoleh nilai indeks *outcome* Pusdiklat JPPPIW periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 (Semester I) sebagai berikut.

Secara grafis fluktuasi nilai indeks *outcome* pelatihan Pusdiklat JPPPIW, indeks *outcome* Pendidikan Pusdiklat JPPPIW dan indeks *outcome* Pusdiklat JPPPIW gabungan adalah sebagai berikut:



Grafik 4. 10 Indeks Outcome Pusdiklat JPPPIW Periode Tahun 2015-2018

Indeks *Outcome* Pusdiklat JPPPIW pada TA 2018 adalah 74,6 (skala 100). Meningkat dibandingkan TA 2017 sebesar 57,6. Pada TA 2018 ini merupakan indeks terbesar yang dicapai Pusdiklat JPPPIW selama periode TA 2015 – 2018.





BAB V PENUTUP

5.1 PERMASALAHAN

- a. Peserta yang diusulkan Pusdiklat/Unor tidak semuanya dapat mengikuti pelatihan, sehingga peserta tidak memenuhi kuota.
- b. Jadwal pelatihan sering kali mundur karena peserta yang kurang dan adanya penyesuaian kebijakan baru.
- c. Keterbatasan kuantitas dan kompetensi pengajar.

5.2 SARAN TINDAK LANJUT

- a. Lebih menggiatkan pelatihan blended learning dan lebih mengakuratkan data calon peserta dari Unor.
- b. Menyesuaikan dengan kebijakan baru.
- c. Diperlukan rekrutmen Widyaiswara baru dan peningkatan kompetensi Widyaiswara eksisting.

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN,
DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**

-  Jl. Abdul Hamid - Bandung
-  Tlp. 022-7208024
-  Email. pusat3bpsdm@yahoo.co.id

